BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu ini merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun dan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar - benar akuntabel dan berkualitas. Hal ini penting karena hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya.

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD ini disusun dengan menggunakan pedekatan teknokratik, politik, *top down, bottom up* dan partisipatif dengan demikian RKPD menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan yang mencerminkan hasil karya seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan cerminan keterkaitan antar program daerah dan Program Pemerintah Pusat. Oleh karena itu agar RKPD ini dapat dimplementasikan dan tercapai hasil yang optimal maka dalam proses evaluasi ini lebih terfokus pada evaluasi RKPD tahun 2014 yang telah dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama untuk kegiatan yang penting dan strategis.

Pelaksanaan pembangunan di Jakarta merupakan proses yang melibatkan multi pemangku kepentingan baik dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan Jakarta secara proporsional. Dengan demikian maka diharapkan pembanguan yang dilakukan di DKI Jakarta benar - benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

Tujuan Pembangunan di DKI Jakarta adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta lahir dan bathin serta mengupayakan tidak terjadinya ketimpangan baik dari sisi sosial ekonomi maupun lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan dilakukan dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Dalam perspektif pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditentukan oleh kinerja seluruh Lurah dan Camat, serta seluruh SKPD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta; dukungan dari Pemerintah Pusat; serta kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya, pada BAB ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 serta pencapaian Indikator Kinerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebagai acuan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Namun terlebih dahulu akan disajikan data dan penjelasan mengenai gambaran umum kondisi Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan gambaran terkait kondisi Provinsi DKI Jakarta.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Provinsi DKI Jakarta

2.1.1. Sejarah Kota Jakarta

Sejarah Kota Jakarta diawali dengan penjelasan tentang berdirinya kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat di dekat kota Bogor sekarang, bernama Pajajaran yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Di sebelah Utara Kerajaan ini berbatasan dengan Muara Kali Ciliwung yang menjadi letak sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang pada waktu itu berfungsi sebagai kota perdagangan. Sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka pada masa itu dikuasai oleh bangsa Portugis, yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara.

Pada awal abad 16, Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, segera menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti "Kemenangan Akhir". Pada tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya oleh Falatehan yang pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi "Jakarta ".

Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang menjadi *Gemeente Batavia* dan diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. *Gemeente Batavia* merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah Gemeente Batavia kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan UU Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (*Syuu*). Keresidenan (*Syuu*) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (*Ken*) dan Kota (*Shi*).

Pada masa pendudukan Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (Tokubetsu *Shi*) di Indonesia selama

pemerintahan militer Jepang. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 setelah kemerdekaan, kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut "Kotapradja Djakarta Raya" dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan "Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya". Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama "Djakarta". Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987) dan Wiyogo Atmodarminto (1987-1992).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997).

Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah.

2.1.2. Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta

Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dengan Otonomi Provinsi DKI Jakarta yang diletakkan pada tingkat provinsi maka Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tersebut juga disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sebagai konsekuensi kedua peran di atas, maka dalam hal perencanaan pembangunan juga mempunyai metode pendekatan tersendiri dan berbeda dengan provinsi lainnya. Dalam hal ini proses ini dimulai dari tingkat Rukun Warga sampai tingkat provinsi dan diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Kota dan Kabupaten hanya bersifat kota administrasi. Kemudian DPRD hanya ada pada tingkat provinsi, tidak ada pada tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi.

Selain sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia, Jakarta mempunyai peran yang penting dan multifungsi. Secara ekonomi Jakarta merupakan kota yang berkontribusi paling tinggi bagi perekonomian nasional, yaitu sekitar 17 persen dari total produk demostik bruto nasional. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional.

Jakarta juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta akan sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk aspek luar negeri.

Sebagai kota internasional tempat komunikasi antar berbagai suku bangsa, maka penting bagi Jakarta dalam melakukan dialog budaya. Jadi secara umum budaya Jakarta dapat dikatakan sebagai pusat akulturasi antara budaya asing dan budaya domestik.

Fungsi lainnya adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah otonom. Fungsi ini mendorong Pemerintahan provinsi DKI Jakarta harus mempunyai pemerintahan yang solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih dan profesional. Sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas.

Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

2.2 Aspek Geografi, Geologi, Klimatologi dan Demografi

2.2.1 Kondisi Geografi dan Topografi

Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran strategis, yaitu sebagai Ibukota NKRI. Sebagai ibukota NKRI berimplikasi bahwa Jakarta mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan provinsi lain. Hal ini menngakibatkan bahwa tantangan dan permasalahan yang dimiliki lebih kompleks dibandingkan daerah lain.

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, perlu memperhatikan kondisi dan potensi eksisting yang ada termasuk posisi geografis. Hal ini dimaksudkan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang sehingga keberlanjutannya dan kelestarian lingkungan terjaga dengan baik.

Secara Geografis, Provinsi DKI Jakarta berada antara 106.22'42" dan 106.58'18" Bujur Timur, serta antara 5.19'12" dan 6.23'54" Lintang Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639,83 km², dengan luas daratan 662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu dan luas lautan 6.977,5 km². Secara rinci Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Batas Administrasi Provinsi DKI Jakarta

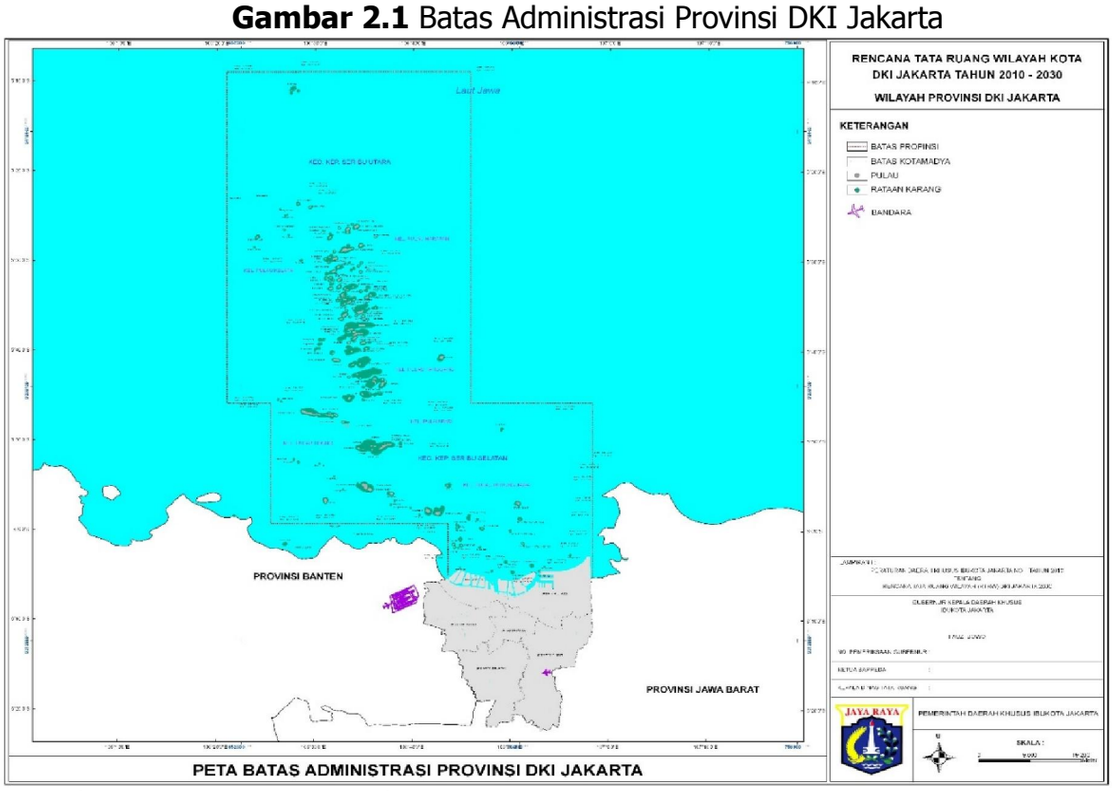

Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

Batas sebelah Utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way*. Sebagian besar karakteristik wilayahnya berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan sebagai daerah Jakarta rawan

genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob).

Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di atas bahwa batas wilayah sebelah Barat adalah Provinsi Banten, dan di sebelah Selatan dan Timur Jakarta berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk dalam kota delta *(delta city)* yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Kota delta Jakarta dialiri oleh 13 aliran sungai dan dipengaruhi oleh air pasang surut. Adapun Peta Aliran Sungai, Kanal dan *Flood Way* yang melalui Wilayah DKI Jakarta, dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2 Peta Tematik Tiga Belas Sungai di Provinsi DKI Jakarta

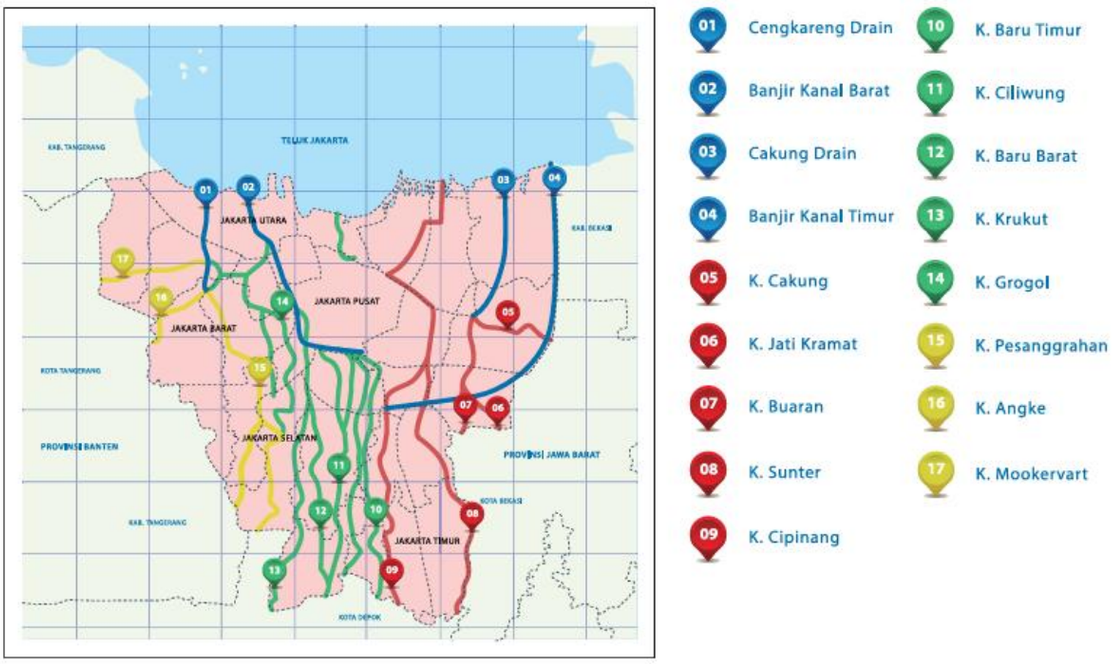

Sumber : RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

Secara topografi, Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut. Namun, sekitar 40 persen wilayah Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Berkaitan dengan wilayah pesisir, wilayah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, yaitu sekitar 155 km^2. Wilayah ini membentang dari timur sampai barat sepanjang kurang lebih 35 kilometer, dan menjorok ke darat antara 4 - 10 kilometer. Wilayah pesisir Jakarta merupakan pantai beriklim panas dengan rata-rata suhu 28,5°C dan rata-rata kelembaban 72 persen.

Di samping wilayah pesisir, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki pulau-pulau kecil yang terletak di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di wilayah ini memiliki luas beragam, sebanyak 45 persen berukuran

kurang dari 5 hektar, sebanyak 25 persen memiliki luas antara 5 - 10 hektar, dan hanya 30 persen yang luasnya lebih dari 10 hektar. Pulau-pulau ini memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong karang, iklim tropis panas dan kelembaban berkisar antara 75 - 99 persen. Dari pulau-pulau kecil tersebut, pulau yang dihuni oleh penduduk hanya berjumlah 11 pulau.

Secara administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi lima kota dan satu kabupaten administrasi. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan lebih efektif dan efisien. Bersamaan dengan pembagian wilayah kota dan kabupaten adminstrasi tersebut, secara paralel jumlah wilayah kecamatan dan kelurahan juga mengalami penambahan. Wilayah kecamatan bertambah dari 43 kecamatan menjadi 44 kecamatan, dan wilayah kelurahan bertambah dari 265 kelurahan menjadi 267 kelurahan.

Sejalan dengan hal ini maka jumlah rukun warga dan rukun tetangga juga bertamabah. Jumlah RW bertambah sampai tahun 2014 menjadi 2.720 RW dan jumlah Rukun Teteangga bertambah menjadi 30.442 RT. Secara rinci pembagian wilayah adminsitrasi ini ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (km^2)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	**Jakarta Pusat**	48,13	8	44	393	4.709
2	**Jakarta Utara**	146,66	6	31	442	5.148
3	**Jakarta Timur**	188,03	10	65	702	7.884
4	**Jakarta Selatan**	141,27	10	65	578	6.139
5	**Jakarta Barat**	129,54	8	56	581	6.435
6	**Kep. Seribu**	8,70	2	6	24	127
	Jumlah	662,33	44	267	2.720	30.442

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Luas wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan adalah 662,3 kilometer persegi. Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km^2, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km^2, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km^2, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km^2, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km^2 dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan 8,70 km^2.

2.2.2 Geologi

Secara geologis, seluruh wilayah Jakarta merupakan dataran alluvial, yang materi tanahnya merupakan endapan hasil pengangkutan aliran permukaan dan air sungai yang mengalir pada wilayah tersebut.

Selain itu, wilayah Jakarta terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat pada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan tanah dimana bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai

merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 kilometer. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun oleh endapan alluvium.

Berdasarkan profil potongan melintang Selatan-Utara, Jakarta menunjukkan adanya endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 m dengan bagian atasnya merupakan batu lempung yang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok M dan Dukuh Atas, Jakarta Selatan.

Selanjutnya dapat diinformasikan pula bahwa formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 meter, sedangkan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 meter. Formasi ini didominasi oleh batu lempung diselang - selingi oleh batu pasir.

Dapat dilihat bahwa formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 meter, sedangkan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 meter. Formasi ini didominasi oleh batu lempung diselang - selingi oleh batu pasir. Gambar 2.3 berikut ini memberikan informasi tentang potongan Melintang Selatan- Utara.

Gambar 2.3 Potongan Melintang Selatan-Utara

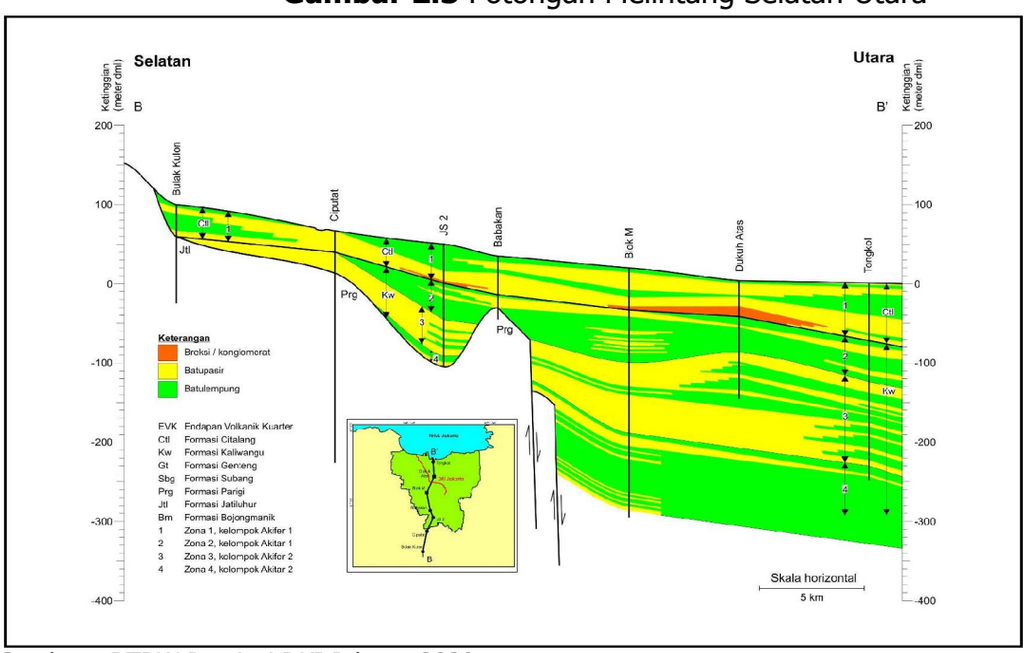

Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

Dapat diketahui bahwa pada seluruh daerah di Jakarta terlihat bahwa strukturnya terdiri dari endapan Pleistocene terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10 - 25 meter, makin ke selatan permukaan keras semakin

dangkal pada kedalaman 8 - 15 meter, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter.

Sementara itu, berdasarkan data, struktur di bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial. Sedangkan pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. Gambar 2.4 memberikan informasi tentang peta geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur.

Gambar 2.4 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur

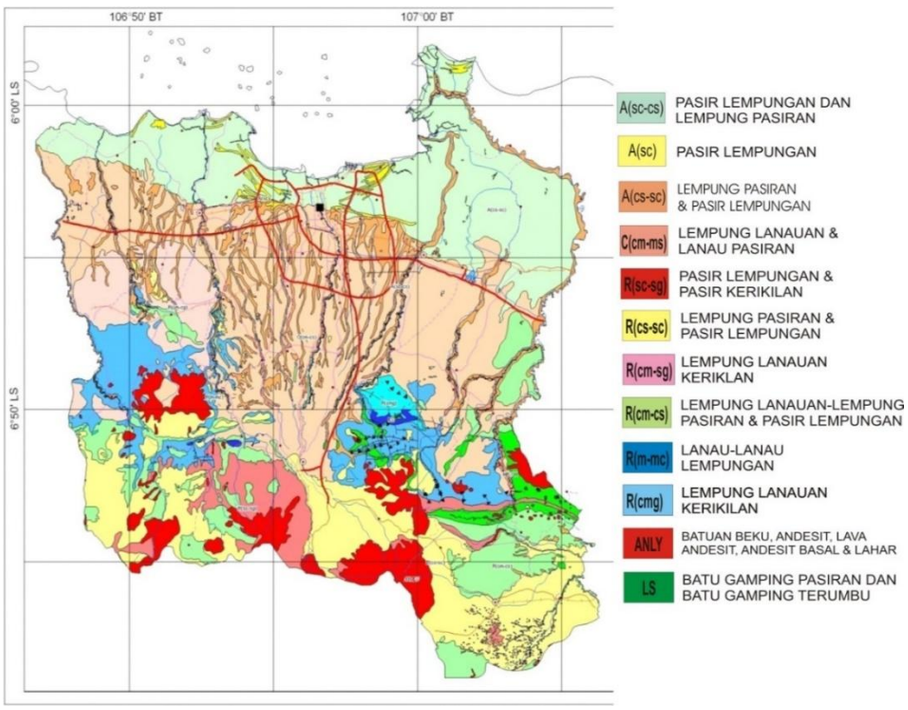

Sumber : Sawarendro dalam LKPJ Provinsi DKI Jakarta 2014

Selanjutnya berdasarkan Gambar 2.4 tersebut dijelaskan secara rinci tentang wilayah Jakarta secara keseluruhan dan rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran. Semakin ke arah Utara mendekati pantai berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3 - 12 meter dengan ketebalan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 300 m.
- Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5 - 13 meter.
- Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan.

- Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas *aluvial* vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal lapisan antara 3-13,5 meter.

Dengan kondisi geografis seperti itu disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2014 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula. Mengingat Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan dana yang sangat besar untuk pembebasan lahan milik warga.

Gambar 2.5 Peta Kemiringan Lereng Jabodetabek

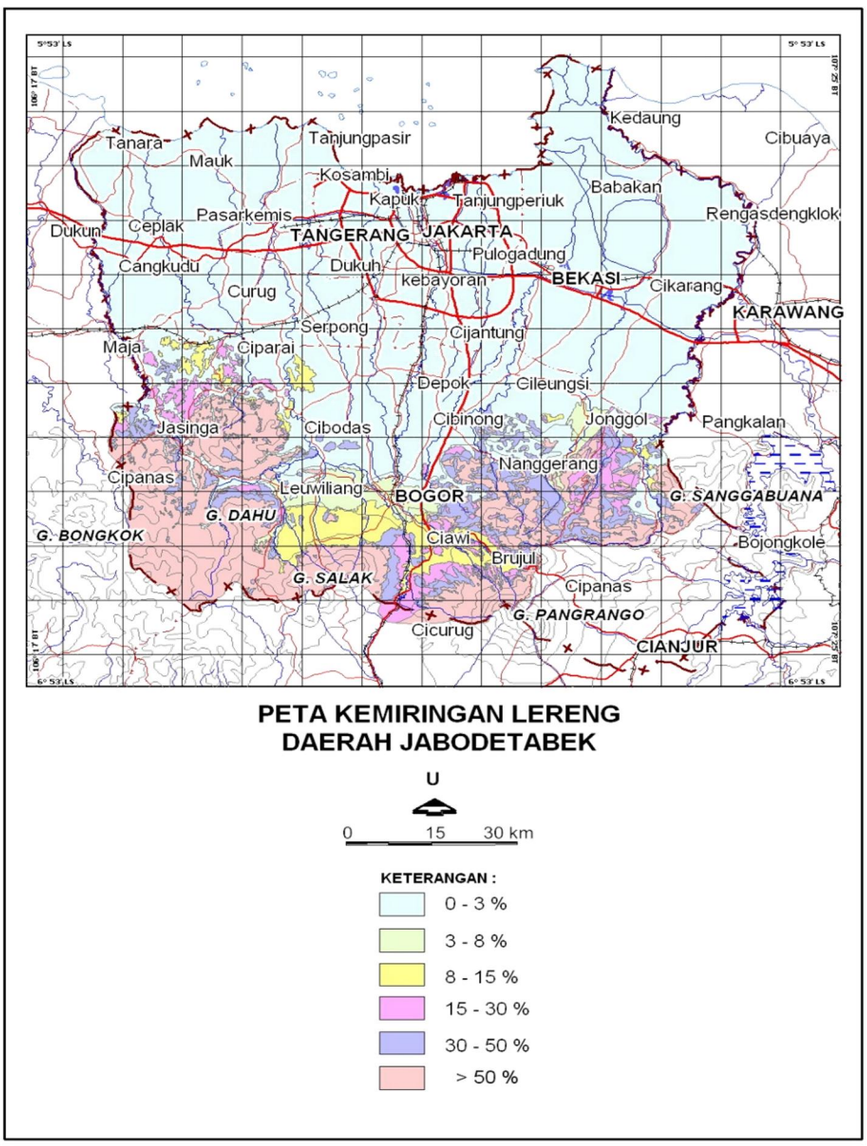

Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak terlepas dari kemiringan lerengnya, lokasi kota Jakarta sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5 di atas, masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3%. Begitu juga

dengan kemiringan lereng pada kota Tangerang dan Bekasi sehingga berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.

2.2.3 Klimatologi

Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Untuk wilayah Jakarta yang termasuk dalam wilayah iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Untuk Jakarta puncak musim penghujan terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar rata - rata 275,1 mm^2 dan hari hujan tertinggi selama 25 hari terjadi pada bulan Januari.

Dalam hal temperatur, temperatur Jakarta rata - rata terendah terjadi pada bulan Januari, sedangkan tertinggi pada bulan Oktober dengan kelembaban udara rata - rata antara 76 persen dan 81 persen.

Dengan posisi yang spesifik, cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Secara rinci data curah hujan dan hari hujan tahun 2013 di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Curah Hujan dan Hari Hujan di Jakarta Tahun 2013

No	Bulan	Curah Hujan (mm2)	Banyaknya Hari Hujan (hari)
1	Januari	621,9	23
2	Februari	146,6	20
3	Maret	184,4	16
4	April	204,3	18
5	Mei	101,0	12
6	Juni	256,7	19
7	Juli	256,7	19
8	Agustus	61,4	8
9	September	49,5	5
10	Oktober	110,1	9
11	November	196,6	14
12	Desember	338,9	23

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Jakarta Dalam Angka 2014

Suhu udara harian rata-rata pada daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Suhu harian rata-rata berkisar antara 27,5º C - 28,6° C. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Kondisi ini dapat dipahami karena perubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu maksimum, minimum dan rata-rata di berbagai lokasi di Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut:

Gambar 2.6. Suhu Maksimum, Suhu Minimum dan Suhu Rata-Rata di DKI Jakarta 2014

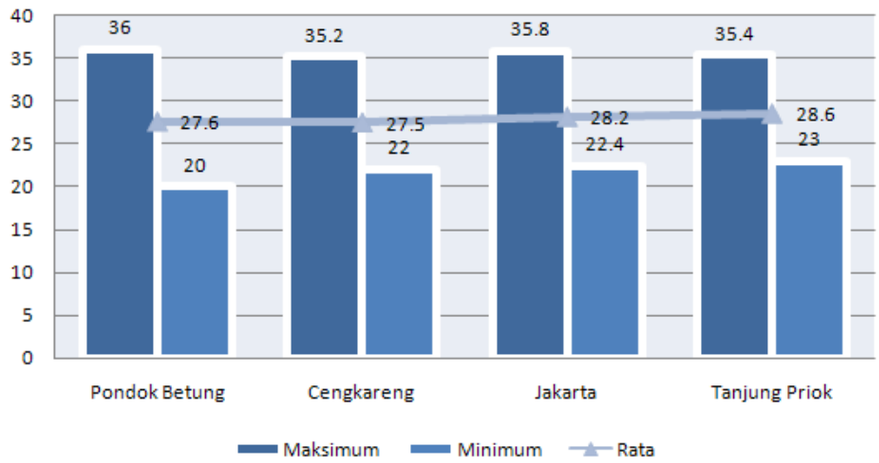

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2014

2.2.4 Kondisi Demografis

2.2.4.1 Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Jakarta diperkirakan mencapai 10.075.300 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.069.900 jiwa dan perempuan 5.005.400 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tercatat 101,7 persen sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2014 mencapai 1,06 persen dengan angka kepadatan penduduk 15.234 jiwa/km^2. Angka kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta termasuk tinggi dibanding provinsi lainnya.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, permasalahan yang harus diatasi adalah penyediaan perumahan dan penataan permukiman termasuk penyediaan prasarana publik seperti sekolah, pusat kesehatan, air bersih dan sanitasi. Oleh sebab itu, pada tahun 2016 penyediaan perumahan dan penataan permukiman menjadi prioritas pembangunan DKI Jakarta.

Tabel 2.3 Penduduk Provinsi DKI Jakarta

No	Uraian	Satuan	SP2000	2011	2012	2013	2014
1	**Jumlah**	Jiwa	8.347.083	9,752,100	9,862,100	9,969,900	10,075,300
2	**Laki – Laki**	Jiwa	4.223.125	4,927,800	4,976,100	5,023,400	5,069,900
3	**Perempuan**	Jiwa	4.123.958	4,824,300	4,886,000	4,946,500	5,005,400
4	**Pertumbuhan**	%	0,78	1.16	1.13	1.09	1.06
5	**Densitas**	Jiwa/Km^2	12.603	14.724	14.890	15.053	15.234
6	**Sex Ratio**	%	102,00	102.1	101.8	101.6	101.7

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2014

2.2.4.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada Gambar 2.7. Pada tahun 2014, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.233.844 jiwa atau 71,80 persen dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 2.486.850 jiwa atau 24,68 persen, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun sebanyak 354.616 atau 3,52 persen. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) DKI Jakarta pada tahun 2014 sebesar 28,20 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 28,20 penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2.7 Struktur Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014

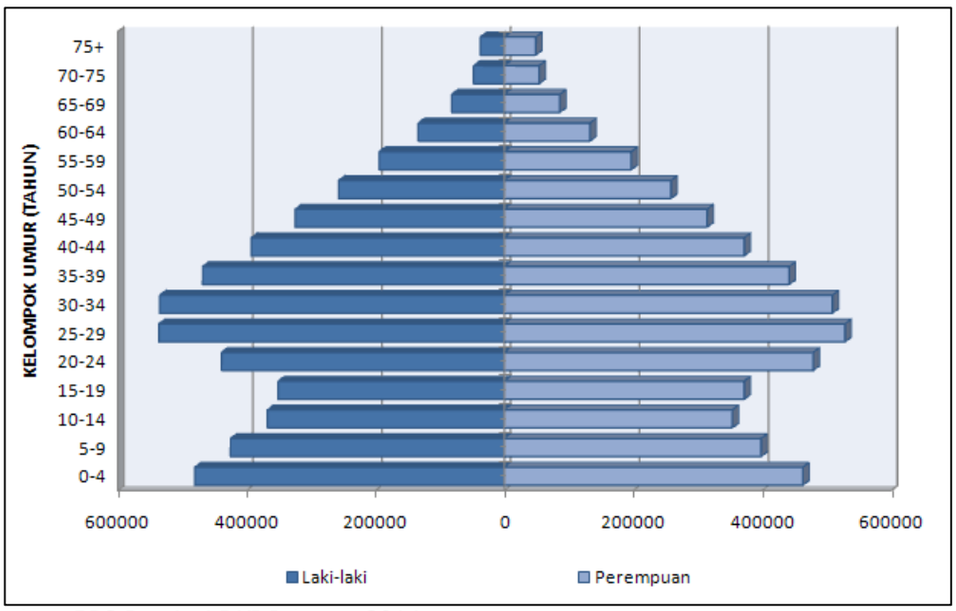

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2014

Berdasarkan data di atas, salah satu permasalahan yang harus diatasi adalah penyediaan lapangan kerja dengan pendapatan yang memadai, penyediaan pusat kegiatan olah raga, seni dan budaya bagi penduduk usia muda. Oleh sebab itu, salah satu prioritas pembangunan Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2016 adalah pengembangan ekonomi produktif berbasis pada kegiatan ekonomi kreatif; dan penyediaan pusat kegiatan olahraga, seni dan budaya.

2.2.4.3 Perkembangan Komuter Jabodetabek

DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi, bisnis, hiburan, pendidikan, perdagangan dan olahraga menjadi daya tarik bagi penduduk di sekitar DKI Jakarta atau komuter. Komuter adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan bekerja/sekolah/kursus di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan secara rutin pergi dan pulang (PP) ke tempat tinggal pada hari yang sama. Komuter menurut tempat tinggal dibedakan menjadi Komuter DKI Jakarta, Komuter Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

Hasil survei BPS DKI Jakarta tentang Komuter Jabodetabek pada tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 9,2 juta penduduk DKI Jakarta yang berumur 5 tahun ke atas sebanyak 14,09 persen merupakan penduduk komuter dan sisanya 85,91 persen adalah penduduk non komuter. Jumlah komuter di DKI Jakarta yang melakukan kegiatan bekerja/sekolah/kursus di dalam wilayah DKI Jakarta 1,05 juta orang, kegiatan di Bodetabek 249 ribu orang dan di luar bodetabek sebanyak 6,1 ribu orang. Sementara komuter Bodetabek yang melakukan kegiatan di DKI Jakarta 1,38 juta orang.

Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara merupakan tujuan sebagian besar komuter DKI Jakarta. Sebanyak 34,78 persen komuter DKI Jakarta melakukan kegiatan di Jakarta Pusat, 21,65 persen berkegiatan di Jakarta Selatan dan 19,68 persen di Jakarta Utara.

Arus komuter Bodetabek yang masuk ke DKI Jakarta terbesar berasal dari Kota Bekasi sebesar 14,80 persen, diikuti oleh komuter yang berasal dari Kota Depok sebesar 11,69 persen dan komuter yang berasal dari Kota Tangerang Selatan sebesar 8,68 persen. Sebagian besar komuter DKI Jakarta yaitu 85,47 persen melakukan kegiatan utama bekerja sisanya sekolah sebesar 14,28 persen dan kursus sebesar 0,25 persen.

Penggunaan moda transportasi kendaraan pribadi lebih tinggi dibandingkan kendaran umum baik untuk komuter Jakarta maupun Komuter Bodetabek. Penggunaan moda transportasi umum komuter Jabodetabek yang berupa kendaraan umum, kereta, Transjakarta/APTB, kendaraan jemputan menunjukkan hanya digunakan sekitar 23 - 30 persen komuter untuk pergi ke lokasi kegiatan dan pulang dari tempat lokasi kegiatan. Secara tabulasi komuter Jabodetabek DKI Jakarta menurut Moda Angkutan dan Tempat Tinggal dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Komuter Jabodetabek Menurut Tempat Tinggal dan Moda Angkutan Tahun 2014 (angka dalam persen)

Tempat Tinggal	Moda Angkutan					Total
	Non Kendaraan (Jalan Kaki, Sepeda)	Kendaraan Pribadi		Kendaraan Umum (Angkutan Umum, Kereta, Trans Jakarta/APTB, Kendaraan Jemputan)	Lainnya	
		Sepeda Motor	Mobil			
DKI Jakarta						
- Pergi	2,27	60,55	13,00	23,64	0,54	100,00
- Pulang	2,37	59,60	12,53	24,95	0,54	100,00
Bodetabek						
- Pergi	1,28	56,83	12,63	28,94	0,32	100,00
- Pulang	1,50	55,34	12,09	30,80	0,26	100,00
Jabodetabek						
- Pergi	1,64	58,19	12,76	27,00	0,40	100,00
- Pulang	1,82	56,90	12,25	28,67	0,36	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2014

Dengan panjang dan lebar jalan yang tidak bertambah secara nyata dan jumlah kendaraan yang terus bertambah, maka mobilitas penduduk

yang sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi akan menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan dan kemacetan di jalan terutama di pagi hari dan sore hari. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 akan tetap memberikan prioritas penanganan kemacetan dengan mengembangkan transportasi publik yang lebih baik, nyaman dan terpadu.

Tabel 2.5 Komuter menurut Moda Transportasi utama yang dipergunakan tahun 2014 (angka dalam persen)

Moda Transportasi Utama yang dipergunakan	DKI Jakarta		Bodetabek		Jabodetabek	
	Pergi	Pulang	Pergi	Pulang	Pergi	Pulang
Jalan Kaki	1,55	1,68	0,83	0,96	1,10	1,22
Sepeda	0,72	0,69	0,45	0,54	0,55	0,59
Sepeda Motor	60,55	59,60	56,83	55,34	**58,19**	**56,90**
Mobil	13,10	12,53	12,63	12,09	**12,76**	**12,25**
Kendaraan Umum	14,15	15,14	14,28	15,63	14,23	15,45
Kereta Api	2,81	2,88	9,40	9,54	6,99	7,10
Bus Trans Jakarta	5,07	5,38	0,85	0,89	2,39	2,53
Kendaraan Jemputan	1,61	1,55	4,41	4,75	3,39	3,58
Lainnya *(omprengan/sharing, dll)*	0,54	0,54	0,32	0,26	0,40	0,36
Jumlah Komuter (orang)	*1.303.441*		*2.262.737*		*3.556.178*	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas diperoleh informasi bahwa komuter Jabodetabek didominasi pengguna kendaraan pribadi yang menggunakan moda sepeda motor berada pada kisaran 58,19 – 56,90 persen dan moda pada kisaran 12,76 – 12,25 persen. Selanjutnya berdasarkan hasil perkiraan kasar jumlah motor dan mobil komuter bodetabek yang memasuki ke Jakarta yaitu 1,41 juta untuk sepeda motor dan 310 ribu untuk mobil pribadi. Selanjutnya untuk mengindentifikasi karakteristik komuter di DKI Jakarta secara lebih lanjut, pada Gambar 2.8 berikut akan ditunjukkan persentase komuter jabodetabek menurut lapangan pekerjaan:

Gambar 2.8 Persentase Komuter Jabodetabek Menurut Lapangan Pekerjaan

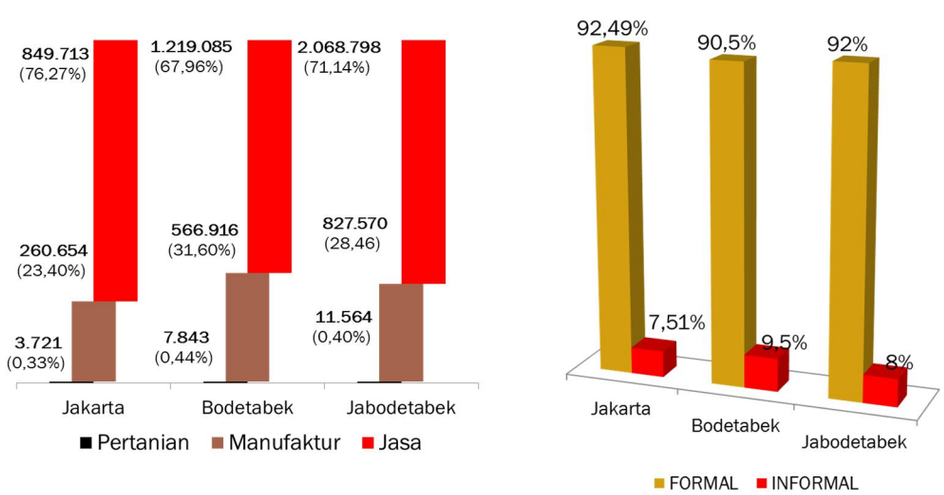

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Dengan kondisi tersebut, tentunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu melakukan kebijakan peningkatan kualitas dan kapasitas angkutan umum massal guna mengurangi permasalahan kemacetan Ibukota.

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk melihat kemajuan suatu wilayah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta sangat berkepentingan terhadap kinerja indikator kesejahteraan masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan kondisi kesejahteraan dan pemertaan ekonomi yang didalamnya mencakup Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial**,** dan Seni Budaya dan Olah Raga.

2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perkembangan nilai PDRB suatu daerah menunjukkan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah. Nilai PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp.1.103,69 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp.1.547,03 Triliun pada tahun 2013 dan Rp.1.761,41 Triliun pada tahun 2014. Peningkatan nilai PDRB selain disebabkan oleh berkembangnya kegiatan ekonomi daerah juga disebabkan oleh perubahan tahun dasar perhitungan dari tahun 2000 menjadi tahun 2010.

Nilai PDRB DKI Jakarta tercatat lebih tinggi dibanding provinsi lainnya sebagaimana terlihat pada Gambar 2.9. Sumbangan PDRB DKI Jakarta terhadap PDB Nasional menunjukkan kurang - lebih 17 persen. Dengan kata lain, DKI Jakarta mempunyai peran sangat penting sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional.

Gambar 2.9 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2014 (Rp.Triliun)

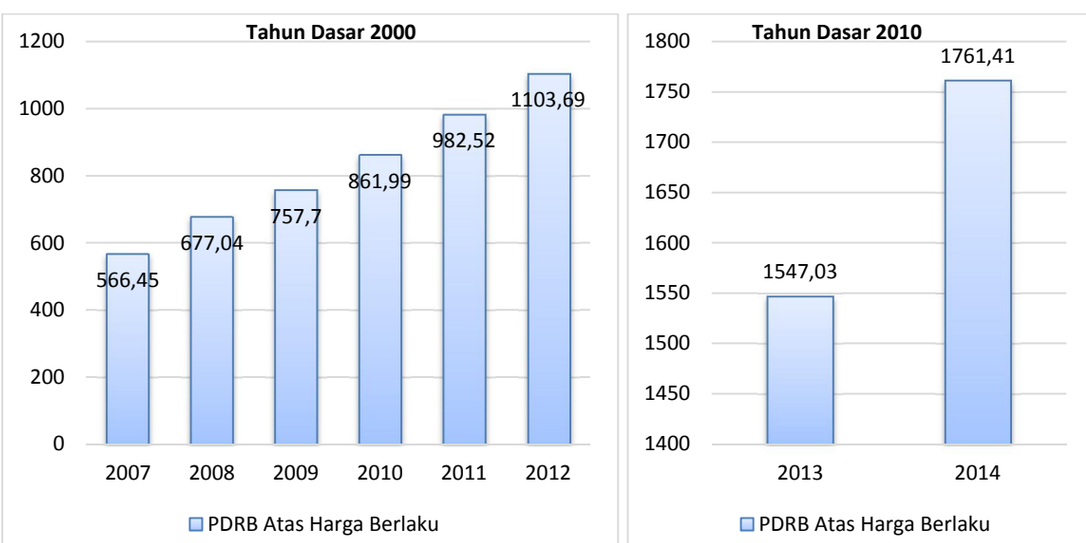

Catatan: Data tahun 2007-2012 tahun dasar 2000, dan data 2013-2014 tahun dasar 2010
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2014

Perkembangan nilai PDRB per kapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB per kapita DKI Jakarta atas tahun dasar 2010 meningkat dari Rp.138,85 juta pada tahun 2012 menjadi Rp.174,82 juta pada tahun 2014 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.9.

Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita cenderung menurun dari 5,34 persen pada tahun 2012 menjadi 4,84 persen pada tahun 2014. Kondisi ini menyiratkan bahwa laju pertumbuhan penduduk terutama migrasi dari luar daerah lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah mendorong perluasan kegiatan ekonomi untuk mendukung pertambahan angkatan kerja baru; dan sekaligus mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mencegah perpindahan penduduk ke DKI Jakarta.

Tabel 2.6 Nilai PDRB dan PDB Perkapita Tahun 2012-2014 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014
1. PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	138,85	155,17	174,82
2. PDB perkapita Nasional Atas Dasar Harga berlaku	33,5	36,5	41,81
3. Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta perkapita	5,34	4,96	4,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2014

Gambar 2.10 PDRB per Kapita DKI Jakarta atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Distribusi kegiatan ekonomi antarkota DKI Jakarta menunjukkan adanya persebaran yang relatif merata, tetapi kesenjangan yang tinggi terjadi antara kota dengan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7. Data BPS menunjukkan bahwa nilai PDRB tertinggi tercatat di Jakarta Pusat kemudian diikuti oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai pusat kegiatan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi. Sementara Jakarta Utara menjadi pusat kegiatan industri; perdagangan, hotel dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi.

Tabel 2.7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2010-2014 (Rp.Miliar)

Kota/Kabupaten Administrasi	2010	2011	2012	2013
1. Kepulauan Seribu	4.061	5.348	5.614	6.011
2. Jakarta Selatan	189.965	216.430	244.309	275.275
3. Jakarta Timur	147.175	165.852	186.434	211.920
4. Jakarta Pusat	227.468	259.680	292.565	336.286
5. Jakarta Barat	128.570	145.329	163.041	186.018
6. Jakarta Utara	161.256	184.295	207.558	236.012
PDRB	861.992	982.534	1.103.693	1.255.998

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Nilai PDRB di Kabupaten Kepulauan Seribu relatif tertinggal sebagai akibat terbatasnya kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di kota, dan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu.

2.3.2 Kesenjangan dan Kemiskinan

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini *(Gini Ratio)*. Koefisien Gini di DKI Jakarta selama periode 2010 - 2014 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.8 relatif fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di DKI Jakarta selama periode 2010-2014 semakin besar meskipun masih dalam kategori ketimpangan rendah. Pada tahun 2012 kategori ketimpangan sebesar 0,397, tahun 2013 sebesar 0,364 dan tahun 2014 sebesar 0,436.

Tabel 2.8 Distribusi Penduduk Menurut Pengeluaran dan Indeks Gini
Tahun 2009-2013 (angka dalam persen)

Distribusi Pengeluaran Perkapita	2009	2010	2011	2012	2013	2014
40% Rendah	19,24	18,25	16,96	15,67	17,59	14,66
40% Menengah	35,64	34,08	35,37	33,94	31,51	35,55
20% Tinggi	45,10	47,66	47,67	50,39	50,90	49,79
Indeks Gini	0,340	0,381	0,385	0,397	0,364	0,436

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2014

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin melalui berbagai program antara lain PPMK, pengembangan UKM dan peningkatan peran koperasi serta upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dengan pemberian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran perbulan perkapita. Metode

penghitungan penduduk miskin melalui metode ini dilakukan dengan menghitung komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Kinerja pembangunan ekonomi daerah selain diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan juga diukur dengan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan BPS DKI Jakarta pada bulan September 2014 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tercatat sebesar 412,79 ribu orang atau 4,09 persen yang apabila dibandingkan dengan Maret 2014 yang sebesar 393,98 ribu orang atau 3,92 persen, jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 18,81 ribu atau 0,17 poin. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2013 (yoy), terjadi peningkatan 41,09 ribu atau 0,37 poin dari 371,70 ribu orang atau 3,72 persen. Lebih lanjut, angka garis Kemiskinan (GK) DKI Jakarta pada bulan September 2014 diketahui sebesar Rp 459.560 per kapita per bulan, lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Maret 2014 yang sebesar Rp 447.797 per kapita per bulan dan angka Garis Kemiskinan September 2013 sebesar Rp 434.322 per kapita per bulan.

Fakta kemiskinan DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa penduduk miskin masih sangat rentan terhadap perubahan harga terutama harga kebutuhan pokok, biaya angkutan dan biaya kesehatan. Penduduk miskin umumnya tinggal di kawasan kumuh, berusaha di sektor informal dan rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah penataan permukiman kumuh, pemenuhan pelayahan kesehatan, pendidikan dan air bersih secara terjangkau, penyediaan tempat usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Lebih lanjut gambaran kemisikinan di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut:

Gambar 2.11 Gambaran Kemiskinan di DKI Jakarta Tahun 2009-2014

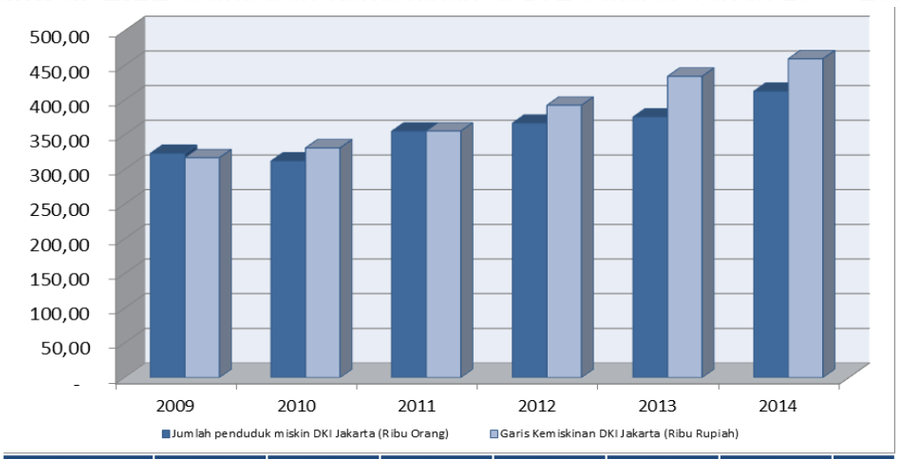

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah penduduk miskin DKI Jakarta (Ribu Orang)	323,20	312,20	355,20	366,77	375,70	412,79
Garis Kemiskinan DKI Jakarta (Ribu Rupiah)	316,94	331,17	355,48	392,57	434,32	459,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Sebagaimana diketahui, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan September 2014 sebesar 64,75 persen atau sebesar Rp 297.543, sedangkan sumbangan Garis Kemiskinan Non Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 35,25 persen atau sebesar Rp 162.017.

Seiring dengan laju inflasi, GK di DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap melakukan berbagai upaya secara terpadu dan berkesinambungan guna mereduksi jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta.

2.3.3 Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dihitung secara komposit, dengan cara mengukur Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli yang diperoleh dari rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2007 - 2013 dapat dilihat pada Gambar 2.12 berikut:

Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) **Provinsi** DKI Jakarta Tahun 2007 – 2013

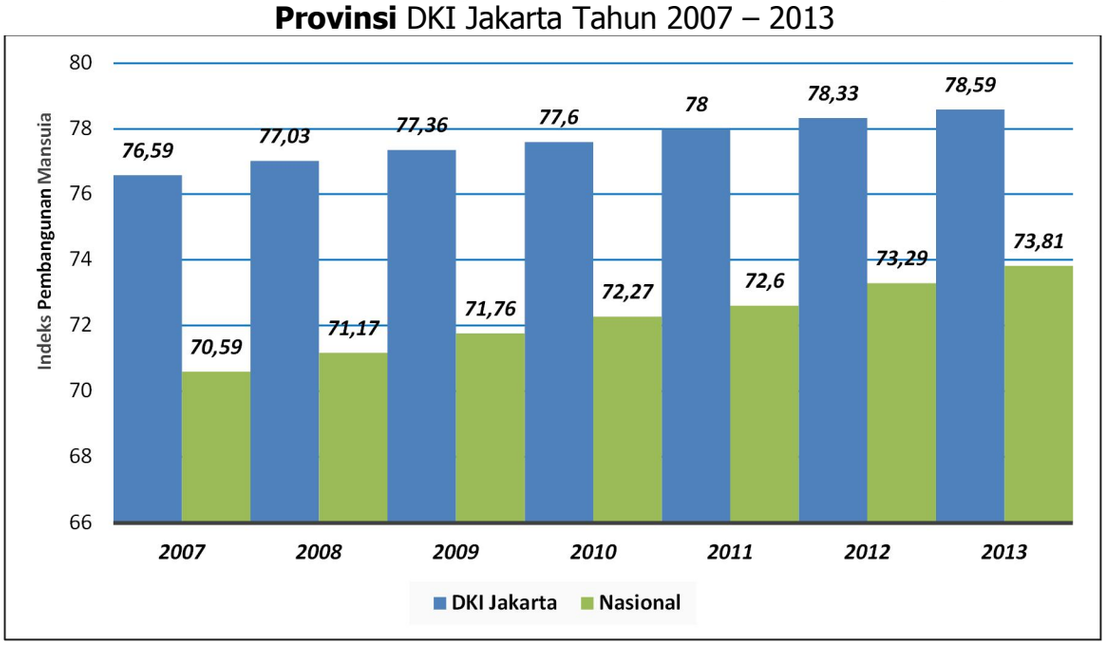

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2014

Data BPS menunjukkan bahwa nilai IPM DKI Jakarta jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nilai IPM DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 78.59, lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional sebesar 73,81. Perbandingan antarprovinsi membuktikan bahwa nilai IPM DKI Jakarta tertinggi dibanding provinsi lainnya. Perbandingan antarkabupaten/kota, nilai

IPM tertinggi dicapai oleh Kota Jakarta Selatan sebesar 80,47 dan terendah Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 71,73.

Angka Melek Huruf (AMH) terus menunjukkan perbaikan. Angka Melek Huruf (AMH) meningkat dari 99,21 persen pada tahun 2012 menjadi 99,22 persen pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar penduduk provinsi DKI Jakarta mampu untuk membaca dan menulis serta menyerap informasi yang ada. Persentase angka melek huruf yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta ini juga mengindikasikan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang cukup memadai. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 meningkat dari 10,98 tahun menjadi 11,00 persen. Penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan stimulus baik di tingkat pusat maupun daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pencapaian ini. Kebijakan tersebut diantaranya kebijakan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, pemberian Biaya Operasonal Sekolah (BOS), dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP), disamping meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan di Jakarta.

Untuk peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan, sejak tahun 2007 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP dipertahankan di atas 100 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK meningkat dari 88,02 persen pada tahun 2013 menjadi 89,13 persen pada tahun 2014.

Kondisi DKI Jakarta yang padat penduduk dan heterogen serta adanya kesenjangan ekonomi yang tinggi berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil survei Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) DKI Jakarta tahun 2014 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari 44 kecamatan dan 267 kelurahan, diperoleh Gambar 2.13 sebagai berikut :

Gambar 2.13 Kelurahan menurut Kategori IPKS tahun 2014

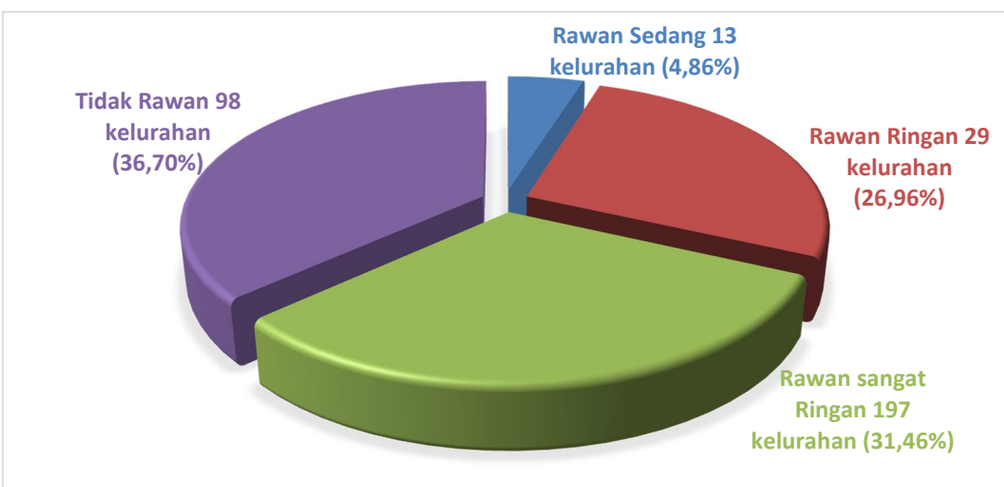

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Kelurahan dengan kategori IPKS tidak rawan adalah kelurahan dengan nilai IPKS 0,00–19,99, kelurahan dengan kategori IPKS rawan sangat ringan

adalah kelurahan dengan nilai IPKS 20,00–24,99, Kelurahan dengan kategori IPKS rawan ringan adalah kelurahan dengan nilai IPKS 25,00–33,99, Kelurahan dengan kategori IPKS rawan sedang adalah kelurahan dengan nilai IPKS 34,00–42,99, dan kelurahan dengan kategori IPKS rawan berat adalah kelurahan dengan nilai IPKS di atas 43,00.

Data BPS menunjukkan bahwa kelurahan di DKI Jakarta dengan ketagori tidak rawan adalah sebesar 36,70 persen, kategori rawan sangat ringan sebesar 31,46 persen, kategori rawan ringan sebesar 26,96 persen, kategori rawan sedang sebesar 4,86 persen, dan tidak ada kelurahan yang berada dalam kategori rawan berat yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Jumlah Kelurahan Berdasarkan IPKS di Kota dan Kabupaten Admistrasi Provinsi DKI Jakarta

Kab/Kota	Tidak Rawan		Rawan Sangat Ringan		Rawan Ringan		Rawan Sedang		Rawan Berat	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kep Seribu	0	1	0	4	4	2	2	0	0	0
Jaksel	1	38	12	49	50	3	3	0	0	0
Jaktim	0	26	9	49	49	7	7	1	0	0
Jakpus	1	0	1	33	33	7	7	10	2	0
Jakbar	1	26	5	45	45	5	5	0	0	0
Jakut	1	7	6	17	17	5	5	2	2	0
DKI JAKARTA	4	98	33	197	198	29	29	13	4	0

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2014, mayoritas Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta telah berada dalam kategori Rawan Sangat Ringan yaitu sebesar 197 Kelurahan. Selanjutnya untuk kategori Rawan Ringan sebesar 29 Kelurahan, Rawan Sedang 13 Kelurahan dan khususnya pada tahun 2014 sudah tidak ada lagi kelurahan yang tergolong dalam klasifiksi Rawan Berat.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkatan kebutuhan hidup cukup di DKI Jakarta tahun 2014, maka dilaksanakan Survei Kebutuhan Hidup Cukup (KHC) 2014. Survei Kebutuhan Hidup Cukup (KHC) 2014 dilakukan berdasarkan kelompok pendapatan yang diklasifikasikan oleh *Asian Development Bank* dan *World Bank*. Garis Kebutuhan Hidup Cukup (GKHC) tahun 2014 di DKI Jakarta adalah Rp. 1.507.208,- per kapita sebulan atau Rp. 5.878.510,- per rumah tangga sebulan atau dibulatkan menjadi Rp. 6.000.000,- per rumah tangga sebulan. Angka ini muncul dengan asumsi rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 3,9 jiwa pada tahun 2014.

Gambar 2.14 Presentase Rumah Tangga Berpendapatan di Bawah GKHC dan Rumah Tangga Berpendapatan Menangah-Atas

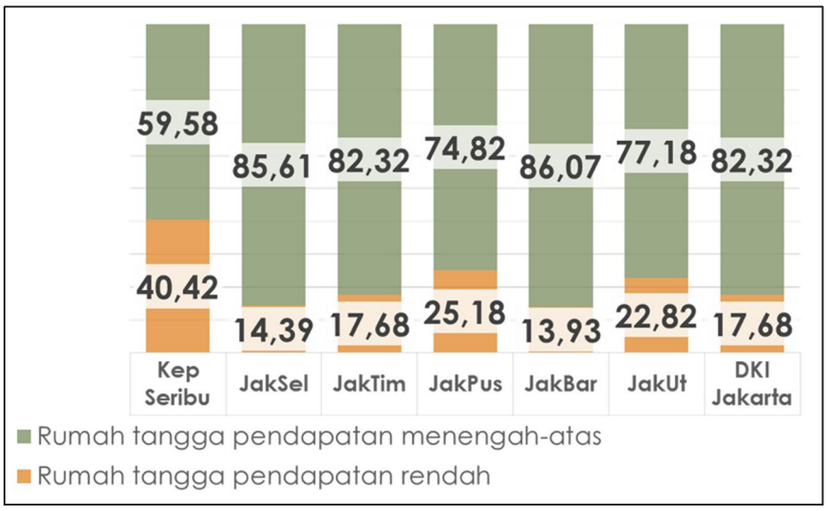

Rumah tangga pendapatan menengah-atas di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 82,32 persen sebagaimana terlihat pada Gambar 2.14. Selanjutnya berdasarkan pembagian Kota dan Kabupaten Administrasi, rumah tangga berpendapatan menengah-atas di Kepulauan Seribu sebesar 59,58 persen, Jakarta Selatan sebesar 85,61 persen, Jakarta Timur sebesar 82,32 persen, Jakarta Pusat sebesar 74,82 persen, Jakarta Barat sebesar 86,07 persen, dan Jakarta Utara sebesar 77,18 persen.

Sementara rumah tangga berpendapatan rendah di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 17,68 persen. Berdasarkan Kota dan Kabupaten Administrasi, rumah tangga berpendapatan rendah di Kepulauan Seribu tercatat sebesar 40,42 persen, Jakarta Selatan sebesar 14,39 persen, Jakarta Timur sebesar 17,68 persen, Jakarta Pusat sebesar 25,18 persen, Jakarta Barat sebesar 13,93 persen, dan Jakarta Utara sebesar 22,82 persen. Dengan demikian, Jakarta Barat memiliki jumlah rumah tangga berpendapatan menengah-atas terbesar dan berpendapatan rendah terkecil. Sementara Kepulauan Seribu memiliki proporsi jumlah rumah tangga pendapatan menengah atas terkecil dan rumah tangga pendapatan rendah terbesar. Tantangan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Administrasi kepulauan Seribu.

Selanjutnya berdasarkan hasil survei maka sebaran rumah tangga dengan pendapatan di bawah garis KHC di DKI Jakarta tahun 2014 adalah Gambar 2.15 berikut:

Gambar 2.15 Sebaran Rumah Tangga Berpendapatan di Bawah Garis KHC di DKI Jakarta tahun 2014

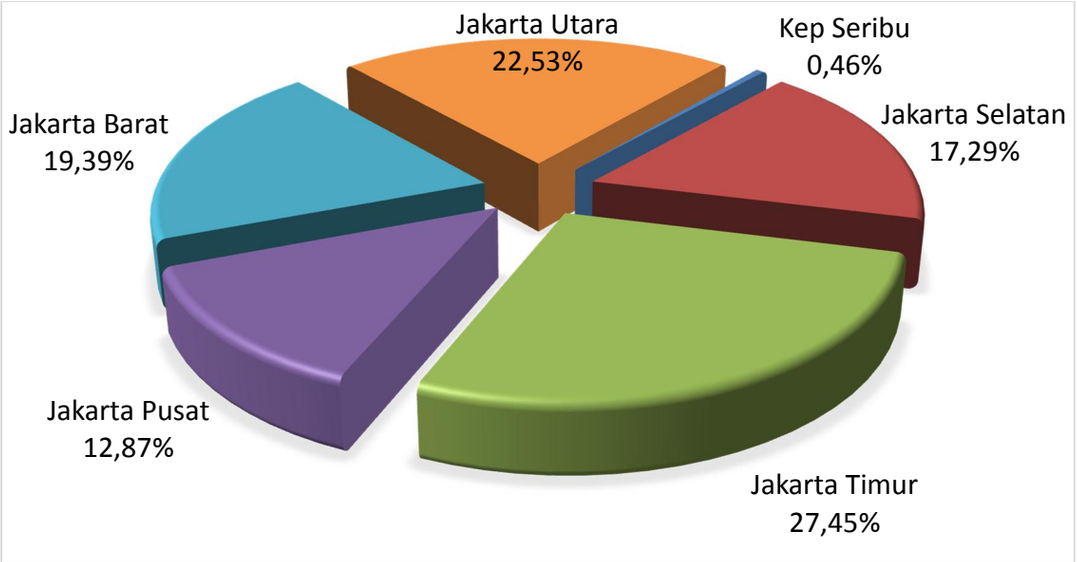

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2015

Berdasarkan Gambar 2.15 di atas maka Jakarta Utara memiliki proporsi rumah tangga berpendapatan di bawah garis KHC terbesar yaitu sebesar 22,53%. Sementara proporsi rumah tangga berpendapatan di bawah garis KHC terkecil adalah Kepulauan Seribu yaitu sebesar 0,46%. Sisanya, yaitu Jakarta Timur sebesar 27,45%, Jakarta Pusat sebesar 12,87%, Jakarta Barat sebesar 19,39% dan Jakarta Selatan sebesar 17,29%.

2.3.4 Seni Budaya dan Olah Raga

Pengembangan seni budaya, kepemudaan, dan olahraga menjadi kegiatan penting. Salah satu kinerja pengembangan seni dan budaya ditunjukan oleh meningkatnya jumlah pemuda aktif dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain pelatihan tenaga kerja mandiri. Dalam hal ini terjadi peningkatan yaitu dari 12 persen pada tahun 2013 menjadi 14 persen pada tahun 2014.

Selanjutnya pembinaan kepemudaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain pembinaan kepramukaan. Kinerja pembinaan kepramukaan ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah anggota pramuka yang aktif dari 223.400 orang pada tahun 2013 menjadi 569.765 orang pada tahun 2014 dan meningkatnya persentase gugus depan pramuka yang aktif dari 65 persen pada tahun 2013 menjadi 70 persen pada tahun 2014. Permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya pengembangan seni dan budaya pemuda dan masih tingginya angka tawuran anak sekolah dan kenakalan remaja. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah mengembangkan dan memperluas kegiatan seni dan budaya, menggalakkan kegiatan kepramukaan, mencegah dan mengatasi tawuran anak sekolah dan kenakalan remaja.

Kinerja pembinaan bidang olahraga sampai dengan tahun 2014 selain diukur dari penyediaan fasilitas dan sarana olahraga juga prestasi.

Pembangunan fasilitas olahraga ditandai dengan beroperasinya Gelanggang Remaja di 36 Kecamatan dan meningkatnya jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar dari 7 Gelanggang Remaja pada tahun 2013 menjadi 12 Gelanggang Remaja pada tahun 2014. Sejalan dengan pembangunan fasilitas olah raga, jumlah pengguna fasilitas olahraga dan pemuda meningkat dari 4.361.520 orang pada tahun 2013 menjadi 4.519.866 orang pada tahun 2014. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi DKI Jakarta sebesar 34 persen dengan meningkatkan frekuensi event olahraga rekreasi dari 4 kali dalam sebulan pada tahun 2013 menjadi 8 kali dalam sebulan pada tahun 2014. Selain itu, prestasi olahraga dan pemuda yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi event dalam dan luar negeri juga meningkat antara lain: Juara Umum POPWIL II Tahun 2014 di Kalimantan Barat dengan perolehan medali 23 emas 5 perak dan 7 perunggu, Medali Perak pada 4th Asia Pasific Deaf Badminton Champion di Taiwan dan prestasi lainnya.

Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kerjasama pemangku kepentingan dalam pengembangan seni dan budaya; terbatasnya inisiatif masyarakat dalam pengembangan kegiatan seni, budaya dan olah raga di kecamatan; dan belum optimalnya pengelolaan kegiatan seni, budaya dan olah raga. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah optimalisasi partisipasi masyarakat dan kerjasama pemangku kepentingan dalam pengembangan seni dan budaya; pengembangan inisiatif masyarakat dalam pengembangan kegiatan seni, budaya dan olah raga di kecamatan; dan pengelolaan kegiatan seni, budaya dan olah raga secara lebih professional.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta diarahkan untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Kinerja pembangunan bidang pendidikan Provinsi DKI Jakarta diukur dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik. Pada tahun 2014 tingkat kelulusan SD mencapai 100 persen, tingkat lulusan SMP sebesar 99,99 persen, tingkat kelulusan SMA 99,99 persen, dan tingkat kelulusan SMK sebesar 99,99 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.16. Tingkat kelulusan menunjukkan bahwa kinerja pendidikan semakin baik.

Kinerja pembangunan pendidikan juga diukur dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas dan Akademi/Universitas meningkat dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.11.

Selain itu, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak sekolah dan belum tamat SD terus berkurang.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih tinggi rasio penduduk yang berpendidikan dasar dan menengah; serta masih terbatasnya akses pendidikan tinggi terutama perguruan tinggi. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kepulauan Seribu, meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dan memperluas akses penduduk ke pendidikan tingggi.

Gambar 2.16 Angka Kelulusan SMA di Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 - 2014

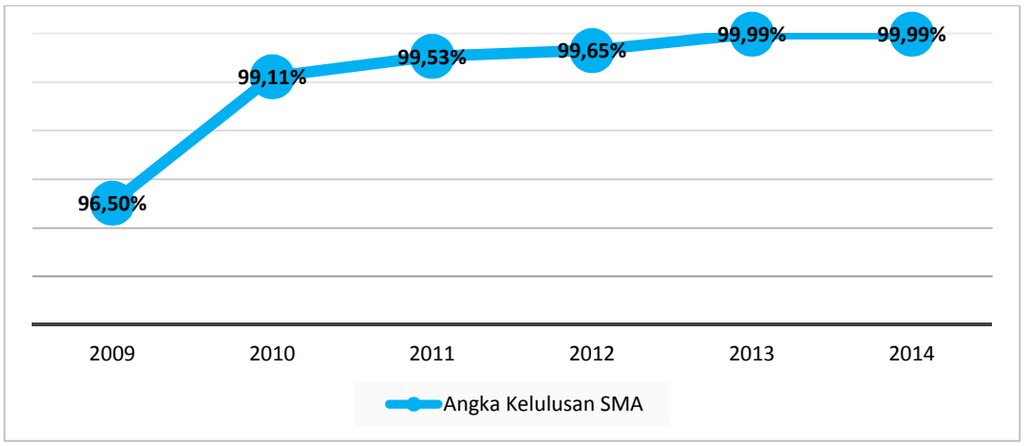

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2015

Disamping itu, terjadi pula peningkatan untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 2.10, Jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas dan Akademi/Universitas meningkat dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Hal yang cukup menggembirakan bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang tidak sekolah dan belum tamat SD terus berkurang.

Tabel 2.10 Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009-2013 (dalam persen)

Jenis Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
Tidak Sekolah dan Belum Tamat SD	10,53	9,15	10,36	9,85	10,31
Sekolah Dasar	20,25	21,62	18,75	17,75	17,46
Sekolah Lanjutan Pertama	19,79	20,37	19,38	19,86	19,55
Sekolah Lanjutan Atas	35,78	35,96	37,27	37,99	39,14
Akademi/Universitas	13,65	13,90	14,24	14,46	13,55
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2014

Salah satu kunci perbaikan kinerja pembangunan pendidikan adalah kebijakan penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) untuk SD/MI, SMP/MTsdan SMA/MA/SMK negeri dan swasta. BOP dan BOB merupakan program yang menunjang pemberian BOS oleh Pemerintah Pusat. Pemberian dana BOP dan BOB oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar. Pemberian BOP meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, BOP telah diberikan kepada 657.609 siswa SDN/MIN, 241.309 siswa SMPN/MTsN, dan 101.824 siswa SMAN/MAN, serta 44.483 siswa SMKN. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menerbitkan dan mendistribusikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada 573,089 peserta didik.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan dana BOS dan BOP dan masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana BOP dan BOS. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi pada tahun 2016 adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dan BOP, meningkatkan akurasi dalam penyaluran dana BOP dan BOS kepada murid yang berhak, dan meningkatkan pengendalian dan evaluasi pengelolaan dana BOS dan BOP.

2.4.2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran kesehatan DKI Jakarta secara umum terus meningkat melalui promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, dan pengembangan prasarana dan sarana Puskesmas. Pembangunan prasarana kesehatan pada tahun 2013 dilakukan dengan mengembangkan sebanyak 1 Puskesmas Kecamatan menjadi Rawat Inap selain Rumah Bersalin (RB) sehingga total menjadi 26 Puskesmas Rawat Inap selain Rumah Bersalin (RB), meningkatkan persentase kapasitas tempat tidur kelas tiga di RSUD dari 73 persen di tahun 2013 menjadi 74 persen di tahun 2014 dan menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat di 19 pasar tradisional dan 14 rumah susun.

Sebagai bagian dari pengembangan promosi kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kinerja pelayanan kesehatan pada tahun 2014 ditandai dengan terbentuknya Kelurahan Siaga Aktif di 206 Kelurahan, meningkatnya kemampuan petugas teknis konseling pada usia lanjut, berkembangnya pengendalian kualitas vaksin, terwujudnya manajemen program immunisasi, teratasinya masalah kesehatan dan KLB, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, penyakit menular, penyakit bersumber binatang.

Tabel 2.11 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2010– 2013 (tenaga kesehatan)

TENAGA KESEHATAN	2010	2011	2012	2013
Dokter Umum	2.873	2.484	2.886	2.629
Dokter Spesialis	1.386	4.232	5.506	6.218
Dokter Gigi	586	725	1.102	1.482
Apoteker	1.886	508	271	271
Asisten Apoteker	1.052	1.142	2.164	2.164
Bidan	1.897	2.111	2.398	2.869

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2014

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.11, Sebagai penggerak pelayanan kesehatan, pada tahun 2013 jumlah tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 15.633 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, dan bidan.

2.4.3. Pekerjaan Umum

Pembenahan dan pengembangan sistem tata air, jaringan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pelayanan penyediaan energi masih menjadi fokus penting dalam urusan pekerjaan umum di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh aspek tersebut terintegrasi dalam rangka upaya mewujudkan pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur kota yang dapat berfungsi optimal.

Pengembangan sistem tata air terbagi menjadi sistem drainase dan pengendali banjir yang difokuskan pada pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana drainase dan pengendalian banjir.

Selanjutnya untuk pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus mengoptimalkan upaya pengembangan situ, waduk dan embung, dan penguatan tanggul, serta pengadaan pompa mobile. Kemudian dalam melaksanakan pengembangan sistem drainase, telah dilakukan normalisasi sungai dan salurannya, serta pengerukan sungai dan salurannya.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dan terus berupaya melakukan pembangunan jalan, fly over (FO) & underpass, pelebaran jalan, pembebasan tanah dan pembangunan jalan tembus (missing link), serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Gambaran lebih lanjut ditunjukkan pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 Panjang Jalan Menurut Kota Administrasi dan Jenis Status Jalan Tahun 2013

URAIAN	JENIS SATUAN JALAN			JUMLAH
	JALAN NASIONAL		PROVINSI	
	TOL	NEGARA		
A. Panjang Jalan (m)	123.481,00	152.517,00	6.599.965,84	6.866.093,84
B. Luas Jalan (m^2)	3.040.746,00	2.743.886,00	41.810.391,97	47.595.023,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta ,2014

Dalam menangani persoalan persampahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoperasikan sampah di tahun 2014 sebanyak 2.067.534,86 ton sampah di TPST Bantargebang serta melakukan penanganan kebersihan kecamatan.

Selain itu, dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dilakukan pendampingan kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) menjadi bank sampah, serta menyelenggarakan Gerakan Jakarta Bersih di 5 (lima) wilayah kota administrasi.

Selanjutnya dalam hal pengelolaan air bersih, hingga tahun 2014 telah terlaksananya terlaksananya konservasi air tanah dengan pengadaan meter air sebanyak 1.092 unit dan membangun dua unit sumur pantau, sumur resapan terealisasi 272 unit dan lubang resapan biopori terealisasi sebanyak 667.573 unit.

2.4.4. Perumahan Rakyat

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Jakarta secara optimal. Pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk mensinergikan Pembangunan rumah susun sewa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olah raga.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pembangunan rumah susun di lima lokasi dan pembangunan rumah susun untuk lokasi binaan di dua lokasi, situ pembebasan lahan untuk rumah susun.

Disamping melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, juga dilakukan penataan lingkungan yang masih masuk kedalam kategori RW Kumuh pada 142 RW disejumlah wilayah DKI Jakarta.

2.4.5. Penataan Ruang

Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas.

Rencana umum tata ruang wilayah untuk Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2030 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 yang mengatur 5 (lima) wilayah kota administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Selanjutnya telah disusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yaitu Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Untuk program perencanaan tata ruang hingga tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yaitu berupa Revisi Penataan Ruang Kawasan Kebayoran Baru dan Penyusunan Panduan Penataan Ruang Kawasan DAS Ciliwung.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ketatakotaan, telah diselenggarakan pelayanan ketatakotaan sesuai Standar Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang, melalui kegiatan Revisi Prosedur Pelayanan Ketatakotaan di Dinas Tata Ruang, Pelatihan *Lead Auditor* ISO 9001:2008, Penunjang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Pelatihan Pengenalan dan Audit Internal ISO 9001:2008 serta Pembuatan SOP Surveyor Berlisensi.

Untuk pelayanan perizinan bangunan, hingga tahun 2014 penerapan sistem online pengawasan penertiban bangunan Pelayanan IMB online telah meningkat dimana tidak hanya untuk pelayanan rumah tinggal tetapi juga untuk pelayanan bagunan lebih dari 8 (delapan) lantai.

Dalam hal penertiban pelanggaran bangunan, persentase penertiban pelanggaran bangunan gedung telah meningkat yaitu jumlah Surat Perintah Bongkar (SPB) dari tahun 2013 sebanyak 51 bangunan sedangkan tahun 2014 sebanyak 55 bangunan.

2.4.6. Perhubungan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk menciptakan sistem transportasi yang handal, berkapasitas massal, efisien dan menjawab kebutuhan masyarakat sehingga menunjang perkembangan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas manusia dan barang dari dan ke luar Kota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengoptimalkan peran *Intellegence Transport System* (ITS) pada koridor busway khususnya dalam hal Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan. Sebagai informasi, sistem ini memberikan informasi kedatangan bus pada koridor busway dan menginformasikan *headway* dari masing-masing bus di setiap koridor serta terus berupaya dalam pelaksanaan sterilisasi Jalur Busway. Pengoperasian Bus Trans Jakarta ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penumpang busway per hari sebanyak 304.799 penumpang/hari (2012) menjadi 306.343 penumpang/hari (2014), selain itu terus diupayakan untuk meningkatkan *headway* rata-rata busway dimana hingga tahun 2014 headaway telah mencapai rata - rata 18,25 menit. Serta meningkatkan jumlah armada Busway dari 669 unit (2012) menjadi 794 unit (2013) dan armada Busway berasal dari hibah sebanyak 30 unit, sehingga jumlah armada Busway menjadi 822 unit di tahun 2014. Selain itu pada tahun 2014 telah bertambah lokasi sarana perpindahan moda yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas sebanyak 3 lokasi. Dalam rangka menunjang pembangunan angkutan umum berbasis jalan, telah dilaksanakan revitalisasi terminal bus Pinang Ranti, Rawamangun, dan Terminal bus Muara Angke.

Upaya dalam pelaksanaan proyek Mass Rapid Transit (MRT), telah terlaksananya pengosongan Terminal Lebak Bulus sebagai depo MRT. Kemudian Telah diselesaikannya pekerjaan *Management Consultating Services (MCS) for Project MRT System.*

Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan dilakukan salah satu caranya dengan melakukan penertiban parkir on street dan telah diterapkannya kebijakan pemasangan parkir meter di sepanjang jalan Sabang pada tahun 2014. Pemerintah DKI Jakarta juga terus berupaya untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi salah satunya berupa upaya penerapan *Electronic Road Pricing (ERP).*

2.4.7. Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Oleh karena itu, pembangunan DKI Jakarta harus memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut,

Pada tahun 2014, Telah dilaksanakan pembebasan lahan untuk RTH Taman dan Taman Pemakaman Umum (TPU) berjumlah 33 lokasi dengan luas 137.464 m^2. Selanjutnya telah dilakukan peningkatan kualitas RTH seluas 12,98 Ha yang terdiri dari luas taman 4,10 Ha, Luas Jalur Hijau 8,97 Ha, dan Luas RTH Pemakaman 0,91 Ha. Sejalan dengan hal itu, telah dilaksanakan pula penggalangan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH Publik/penghijauan lingkungan diantaranya pembangunan peningkatan fungsi dan revitalisasi Taman Jalur Hijau Pemuda Jaktim Lokasi Jl. Pemuda, Taman Langsat, Taman Buni (Kahfi), Taman Amir Hamzah, Taman Gandaria, Taman Tebet, Taman Kaliandra (Gebang Sari), Taman Cattleya, Taman Semanggi, Taman Pelepah Indah RW 18/5 Kelapa Gading dan Taman Lalu Lintas Gorontalo.

Dalam hal penanganan persampahan, pada tahun 2014 peningkatan/ pembangunan TPS mengarah pada TPS Standar Ramah Lingkungan di 43 titik pada 5 wilayah Kota Administrasi. Selanjutnya telah dilaksanakan pula pembangunan Tempat Transit Sampah Pesisir dan Pantai Pulau Pemukiman di Pulau Tidung dan Pulau Harapan Kepulauan Seribu. Selain itu dilaksanakan pula penanganan Sampah Pesisir dan Pantai Pulau-pulau di Kabupaten Administrasi Kep. Seribu, Pesisir dan Pantai Utara Jakarta, serta Muara 13 Sungai di Teluk Jakarta. Kemudian dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan persampahan, telah disusun zonasi pelayanan pengelolaan sampah secara mandiri.

Dalam pengelolaan air limbah domestik telah dilakukan penyedotan septic tank dan pengolahan di IPAL Duri Kosambi dan Pulo Gebang. Selain itu, juga dilakukan pembangunan IPAL komunal melalui kegiatan Sanitas Berbasis Masyarakat (Sanimas). Untuk skala kota/provinsi telah dilakukan perencanaan pembangunan air limbah sistem terpusat zona 1.

2.4.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dikarenakan dampaknya yang cukup signifikan terhadap tingkat kesejahteraan warga antara lain adalah program keluarga berencana, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, peningkatan peran serta masyarakat dalam

pelayanan KB dan kependudukan, advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi, bina ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Pencapaian dalam hal urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah Dipertahankannya *Total Fertility Rate* 2,2. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dari 1.050.086 peserta Tahun 2013 menjadi 1.108.841 di tahun 2014. Kemudian menurunnya cakupan Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB dari dari 13,2 persen pada tahun 2013 menjadi 11,64 persen pada tahun 2014. Menurunnya persentase Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun dari 3,6 persen pada tahun 2013 menjadi 3,5 persen pada tahun 2014. Dipertahankannya persentase masyarakat yang memahami program KB dan kependudukan di atas 60 persen sejak tahun 2012. Meningkatnya jumlah pengembangan dan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dari 324 PIK Remaja di tahun 2013 menjadi 402 remaja di tahun 2014.

2.4.9. Ketenagakerjaan

Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja mengalami kenaikan dari 9.076 orang pada tahun 2013 menjadi 31.850 orang di tahun 2014 hal tersebut diimbangi oleh meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 40.238 perusahaan pada tahun 2013 dengan jumlah peserta aktif 3.001.987 orang menjadi 42.773 perusahaan di tahun 2014 dengan jumlah peserta aktif sebanyak 3.191.114 orang. Selain itu terjadi peningkatan pada jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan sebanyak 1.256 orang di tahun 2013 menjadi sebanyak 2.313 orang pada tahun 2014.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta, dari tahun 2010 sampai tahun 2012 cenderung terus meningkat namun terjadi penurunan pada tahun 2013 dan sedikit peningkatan pada tahun 2014. Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut.

Gambar 2.17 Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi DKI Jakarta

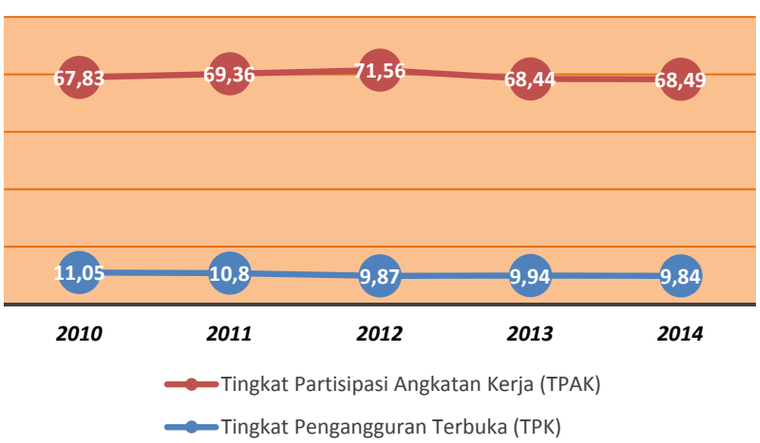

Sumber: Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2015

2.4.10. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth,* dan *pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Jakarta, diperlukan keberpihakan pada usaha mikro kecil dan menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja. Indikator pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro menengah antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Jakarta. Dapat diinformasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif dan volume usaha koperasi sebanyak 96 koperasi dan 15,7 triliun di tahun 2014 dari 6,6 triliun di tahun 2013, serta meningkatnya persentase jumlah koperasi baru sebanyak 66 koperasi. Selain itu telah dilaksanakan juga penyediaan sarana dan prasarana usaha pedagang di Lokasi Binaan Kramat Jati, Lorong 103 Blok A, Makassar, dan Meruya Ilir berupa pembangunan hanggar, pemasangan meteran listrik, perbaikan keramik dan plafon serta penyediaan CCTV serta Penyelenggaraan *Night Market* sebanyak 17 kali di Provinsi dan 35 kali di Wilayah.

2.4.11. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pada urusan ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna terwujudnya pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan tetap berpegang pada prinsip *Good Governance*. Dalam penyusunan dokumen kebijakan, jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya pada tahun 2014 sebanyak 18 Raperda.

Dalam hal pelayanan publik, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya penanganan bencana banjir tingkat kelurahan pada 135 kelurahan dan penanganan bencana kebakaran tingkat kelurahan pada 234 kelurahan.

Selanjutnya terkait administrasi keuangan daerah yang telah dilaksanakan adalah pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, pembangunan Aplikasi Pengelolaan Data Wajib Pajak, pembangunan Aplikasi Penilaian Individu dan Pasar Properti PBB-P2, pemeliharaan Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) Berbasis Web, pembangunan Aplikasi Pelaporan dan Backup Data PKB dan BBN-KB, pembangunan Aplikasi Layanan Sistem Informasi Pajak Daerah, serta pengembangan Aplikasi GIS PBB-P2 dan Pajak Daerah lainnya.

Terkait dengan urusan kepegawaian, yang telah dilakukan diantaranya pengadaan CPNS dengan metode CAT *(Computer Assisted Test)* di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Seleksi Terbuka Jabatan Struktural dan Jabatan Tertentu Lainnya serta Pelaksanaan Inspeksi Mendadak rutin dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu seperti: Sidak sehubungan Instruksi Gubernur Prov DKI Jakarta No.150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum Bagi Pejabat Prov DKI Jakarta,

Sidak terhadap kehadiran pegawai, pengawasan pelaksanaan pengaturan hukuman disiplin dan sidak Idul Fitri.

Di bidang penanggulangan bencana kebakaran, telah diperoleh cakupan pelayanan bencana kebakaran dalam radius 1,25 km, tercapainya 70,0% petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan, Terbangunnya hidran kering sebanyak 4 (empat) titik pada Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Barat, Bertambahnya mobil pompa *light fire truck c/w water mist system* dan kelengkapannya sebanyak 20 unit, mobil pompa 4.000 liter sebanyak II unit untuk mendukung Pos Pemadam bergerak jenis *caravan* dan *container*. Dalam hal prasarana penanggulangan kebakaran, telah meningkatnya rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan yang diikuti oleh kemampuan mengurangi rata-rata waktu pemadaman menjadi 80 menit.

Dalam hal ketertiban masyarakat, telah terlaksana kegiatan pembekalan potensi, masyarakat bagi 1.200 orang serta pembinaan anggota linmas dan materi objek vital bagi 2.400 anggota linmas di tingkat RT/RW dan pelaksanaan lomba poskamling yang diikuti oleh 44 poskamling.

2.4.12. Perdagangan

Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas - fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan, dan penataan pasar tradisional.

Dalam hal pelayanan masyarakat, Pemerintah DKI menerbitkan sejumlah izin usaha perdagangan yang diterbitkan di kawasan Tanah abang, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai, Jatinegara, Bandar Kemayoran, Dukuh Atas, Mangga Dua, Sentra Primer Barat, dan Sentra Primer Timur sebanyak 31.644 dokumen di tahun 2012 menjadi 35.242 dokumen di tahun 2013 dan 28.623 dokumen di tahun 2014. Penurunan tersebut disebabkan adanya perpindahan aktivitas perizinan ke BPTSP. Hal ini diikuti dengan penurunan jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) pada tahun 2014 sebesar 52.789 pelaku usaha dari sebelumnya 67.098 di tahun 2013.

Selain itu, kegiatan urusan perdagangan ini tetap mempertahankan jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan. Nilai ekspor melalui DKI Jakarta periode Januari - Desember 2014 mencapai 48.079,48 juta US $ atau lebih tinggi 1,43 persen dari periode yang sama tahun 2013 yakni sebesar 47.402 juta US $. Sepanjang periode 2014 tercatat nilai ekspor melalui DKI Jakarta tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 4.323,05 juta US $ dan terendah terjadi di bulan Juli sebesar 3.696,60 juta US $. Menurunnya nilai ekspor melalui DKI Jakarta ini disebabkan belum pulihnya kondisi perekonomian global yang kemudian berdampak meningkatnya jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI dari 20 pelaku usaha di tahun 2012 menjadi 100 pelaku usaha di tahun 2013 menjadi 117 pelaku usaha di tahun 2014.

Selain itu dalam hal perindustrian yang terkait dengan perdagangan, telah dilaksanakan penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) Tahun 2013 di Monas dengan menghadirkan 125 IKM Kreatif di Provinsi DKI Jakarta dan pada tahun 2014 menghadirkan 248 IKM.

2.4.13. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral yang telah berhasil dilaksanakan diantaranya dengan terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa sepanjang 22 Km (Depok - Blok M) ; pembangunan pipa gas sepanjang 44 Km (Tanjung Barat - Plumpang); Terkoordinasinya pembangunan 6 SPBG (SPBG Pulo Gebang, Kampung Melayu, Plumpang, Ancol, Pulo Gadung dan Cililitan) dan 8 Unit Mobile Refueling Unit (MRU) yaitu sebanyak 7 Unit milik Pertamina dan 1 Unit di Pluit milik PT.PGN.

Selanjutnya telah tersedia skenario mitigasi gempa bumi (Peta Resiko Gempa pada bangunan dengan berbagai skenario kejadian gempa perkecamatan sesuai dengan RDTR Jakarta 2030).

Dalam upaya peningkatan jumlah sumur resapan, sampai dengan tahun 2014, jumlah sumur resapan yang terbangun yaitu sebanyak 2.675 titik sumur resapan.

Apabila dari aspek penerangan jalan, yang telah tercapai diantaranya meningkatnya jumlah lampu PJU pada jalan protokol, arteri, kolektor, lingkungan/gang MHT, dan fasilitas umum sebanyak 16.134 titik lampu PJU, normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi sebanyak 32 kWh Meter, jumlah sumur resapan yang terbangun sebanyak 2.675 titik sumur resapan.

2.4.14. Pariwisata

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pariwisata, antara lain meningkatnya jumlah kunjungan wisman menjadi sebanyak 2.319.335 orang dan wisnus menjadi sebanyak 41.871.178 orang serta meningkatnya rata-rata lama tinggal selama 5 hari. Kemudian tersedianya kapasitas dan fasilitas MICE sebanyak 5 gedung (*international standard*).

Lebih lanjut pencapaian yang diperoleh diantaranya terlaksananya *International Dance* Festival, Gebyar Budaya Hari Pariwisata Dunia, Jakarta *Kineforum Outdoor Cinema*, Jakarta *International Performing Art*, Jakarta Maraton. Pemilihan Abang dan None Jakarta, Jakarta *Cosplay Parade*, *Festival Jakarta Great Sale* (FJGS), Promosi Pariwisata Dan Budaya Jakarta di Jepang, Promosi Pariwisata Jakarta di Timur Tengah.

Selanjutnya terlaksana pula partisipasi Jakarta Fair yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni s.d 6 Juli 2014 dan keikutsertaan pada *the 53rd International Congress and Convention Association* (ICCA) yang

diselenggarakan pada Bulan November 2014 dan diikuti oleh para pelaku bisnis dan industri pariwisata internasional.

2.4.15. Kelautan Dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan yang berhasil pada tahun 2014, antara lain meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap menjadi 258.025 ton, dan ikan hias menjadi 17.661.943 ekor, jumlah benih/bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan sebanyak 6.146.640 ekor, kemudian diperoleh volume ekspor hasil perikanan sebanyak 58.000 ton, volume produk olahan hasil perikanan sebanyak 161.000 ton kemudian meningkatnya Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan menjadi 40 kasus.

Terlaksananya penyusunan perencanaan pengembangan Ecomarine Muara Angke dan penyusunan naskah akademis rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZW3K). Kemudian telah ada peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut sebanyak 47 unit keramba jaring apung beserta kelengkapannya. Telah dibuatnya sistem perizinan kapal perikanan < 30 GT (Gross Ton) dan sistem tanda daftar usaha perikanan secara online.

2.4.16. Perindustrian

Urusan Perindustrian merupakan salah satu urusan yang memiliki peran yang strategis dalam perekonomian DKI Jakarta. Pada urusan ini telah dilaksanakan beberapa sasaran program antara lain antara lain meningkatnya jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, bertambahnya jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukan, dan Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri) melalui penyelesaiannya dan penandatanganan MoU pemanfaatan kawasan pergudangan Industri PT JIEP.

Selain itu urusan perindustrian juga telah berhasil menambah jumlah peralatan untuk pengujian produk industri yang memenuhi standar sebanyak 38 unit. Selain itu urusan perindustrian juga telah mampu berkinerja cukup baik dengan indikator bertambahnya jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai Peruntukan di lokasi sentra batu aji dan jumlah produk industri yang memenuhi standar sebanyak 1.573 produk berstandar.

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

Jakarta sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional dan internasional harus memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik kota.

Provinsi DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang dinilai cukup kompetitif dalam memimpin pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai

ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta juga merupakan kota yang paling berkembang diantara kota - kota lain di Indonesia. Faktor - faktor yang berperan cukup penting dalam mendorong daya saing provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

2.5.1. Kemampuan ekonomi makro

Perekonomian makro Jakarta selama ini dapat dikatakan tumbuh dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari tren peningkatan angka total PDRB baik berdasarkan komponen lapangan usaha maupun pengeluaran, total PDRB per Kapita, Konsumsi Rumah Tangga, proporsi pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta proporsi konsumsi pemerintah. Faktor lain yang menjadi acuan adalah nilai inflasi dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar amerika.

2.5.2. Kemampuan Keuangan daerah

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatan perolehan dana perimbangan.

2.5.3. Fasilitas Infrastruktur

Persaingan perekonomian global diproyeksikan semakin ketat. Jakarta sebagai kota yang multifungsi membutuhkan infrastruktur guna menghadapi persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan kota jakarta yang berdaya saing global.

Secara keseluruhan, transportasi merupakan infrastruktur perekonomian yang sangat penting. Dengan ketersediaan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah juga diperlukan sistem transportasi yang maju, handal, modern, dalam arti terintegrasi antar dan inter moda.

Masalah transportasi menentukan daya saing kota. Pembangunan transportasi di DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak mencukupi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung pelabuhan dan bandar udara, transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, aspek ini perlu menjadi perhatian dalam rangka pencapaian target per tahunnya guna tercapainya upaya peningkatan daya saing daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, infrastruktur energi juga dibutuhkan untuk aktivitas produksi. Dengan ketersediaan energi yang mencukupi didukung dengan efisiensi dalam penggunaanya akan mendorong tingkat produktivitas daerah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kemampuan daya saing. Salah satu infrastruktur energi yang krusial bagi kota Jakarta adalah infrastruktur listrik guna memenuhi kebutuhan Jakarta sebagai Ibukota.

Perekonomian daerah sangat tergantung dari jasa perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini menandakan bahwa iklim perekonomian Jakarta cukup kondusif.

2.5.4. Iklim Investasi

Fungsi Investasi di Jakarta sangat penting dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Jakarta antara lain ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi adalah kecepatan perijinan, kondisi keamanan, ketentaraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.

Selanjutnya selain jumlah angkatan kerja, faktor penentu investasi adalah kebijakan penentuan upah minimum provinsi (UMP) untuk pekerja. UMP di Jakarta terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan iklim investasi agar menjadi lebih kondusif.

Demonstrasi mahasiswa juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat investasi di Jakarta. Jumlah aksi demo dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal ini menandakan bahwa stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban mendapat perhatian serius.

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di DKI Jakarta diantaranya adalah kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnyaakan diproses oleh SKPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh SKPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukkan proses yang ideal.

Selanjutnya selain permasalahan perizinan dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur serta kondisi ketentraman. Selain itu permasalahan lainnya adalah belum tercukupinya pasokan energi, dan belum mantapnya sistem ketenagakerjaan. Dalam konteks ini infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan,

pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan penanaman modal atau investasi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil yang positif, Hal ini menandakan, DKI Jakarta tetap menarik bagi investor domestik dan mancanegara untuk menanamkan modalnya.

2.5.5. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kondisi kualitas sumber daya manusia yang bekerja di Jakarta didominasi oleh pekerja dengan pendidikan tertinggi sekolah menengah umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta menyadari arti pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas. Diharapkan produktivitas sumber daya manusia Jakarta meningkat sehingga dapat menjadi daya saing bagi Jakarta untuk masa yang akan datang.

Sumber daya manusia aparat pemerintah mendapat perhatian khusus. Dengan kualitas SDM aparatur yang memadai akan memberikan konstribusi yang signifikan terhadap aspek daya saing daerah. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan SDM menjadi penting. Ini semua diwadahi dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi secara bertahap, berkesinambungan, dan konsisten.

2.5.6. Lingkungan Strategi Nasional, Regional, dan Global

Perkembangan nasional, regional, dan global merupakan tantangan yang harus dihadapi kota Jakarta. Untuk itu diperlukan persiapan dan perencanaan komprehensif dari berbagai aspek termasuk penguatan kapasitas inovasi.

Perubahan lingkungan nasional secara langsung akan mempengaruhi kondisi dan kinerja kota Jakarta. Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, perubahan lingkungan dunia usaha, dan perubahan praktek bisnis. Dalam pengelolaan keuangan, lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (PERFINDO), telah memberikan peringkat AA Plus dengan stable outlook kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang artinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang relatif. Pada lingkup regional, perubahan tatanan ekonomi, sosial, dan budaya ditandai dengan rencana terbentuknya masyarakat ASEAN pada tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA). Sementara itu, di tingkat global perubahan tatanan ekonomi sosial dan budaya ditandai oleh semakin berperannya multi national corporation, terintegrasinya sistem keuangan global, perdagangan bebas, serta munculnya regionalisasi perekonomian. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, maju dan modern akan berdampak pada tinggi dan kompleksnya dinamika pasar dan perubahan sosial budaya masyarakat.

Kinerja perekonomian Jakarta yang baik, telah menempatkan Jakarta pada posisi 17 dari 200 kota metropolitan dengan kinerja ekonomi terbaik di dunia berdasarkan laporan Global Metro Monitor 2011. Dari segi daya saing global, pada tahun 2012 Economist Intelligence Unit juga menempatkan daya saing kota Jakarta ke dalam peringkat 81 dengan skor 44,1 dari 120 kota dunia. Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan untuk menarik modal atau investasi, bisnis, dan pengunjung. Kondisi Jakarta terkait dengan daya saing kota dapat digambarkan melalui beberapa indikator di antaranya kemampuan ekonomi makro dan keuangan daerah, infrastruktur, iklim invesatasi, kapasitas dan kualitas SDM, serta posisi Jakarta di lingkungan nasional, regional, dan global.

Sedangkan dalam kategori *Asian Green City Index* berdasarkan hasil penelitian The Economist Intelligence Unit yang difokuskan pada kondisi dan kebijakan pengelolaan lingkungan, Jakarta masuk kedalam klasifikasi kota sejajar dengan Bangkok, Shanghai, Beijing dan Kuala Lumpur. Klasifikasi ini diukur berdasarkan delapan kategori yaitu energi dan CO2, tata guna lahan dan bangunan, transportasi, limbah, air, sanitasi, kualitas air, dan lingkungan pemerintahan.

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2014

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukkan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kineja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, yang meliputi Program Unggulan dan Prioritas. Selanjutnya untuk pencapaian hingga tahun 2014, diuraikan pada tabel 2.13 mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2014.

Tabel 2.13 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2014

Selain pembangunan yang telah diuraikan secara terperinci seperti di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakkarta juga melakukan pembangunan dalam kerangka Millenium *Development Goals (MDG's).* Secara terperinci pencapaian Millenium *Development Goals (MDG's)* dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menurunkan angka kemiskinan membutuhkan upaya yang lebih karena DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang sudah jauh dibawah rata-rata angka kemiskinan nasional. Tercatat hingga tahun 2013, 3,72% penduduk DKI yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin serta lebih memfokuskan kepada aspek pemerataan pendapatan dan akses kepada pelayanan dasar yang berkualitas. Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kerangka affirmative action program-program penanggulangan kemiskinan perlu lebih berfokus kepada pemerataan pendapatan serta akses pelayanan dasar yang berkualitas.

Produktivitas tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan. Diantaranya ditandai dengan meningkatnya rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian rasio tertinggi terjadi pada tahun 2012 (64,50) dalam 10 tahun terakhir. Sementara proporsi pekerja sektor informal mengalami penurunan sejak tahun 2009 (30,61%) menjadi 23,52% di tahun 2013.

Provinsi DKI Jakarta telah membuat kemajuan yang bermakna dalam upaya perbaikan gizi selama dua dasawarsa terakhir ini, dari 31,0% pada tahun 1989 (sebagai acuan awal yang digunakan pada tingkat nasional), menjadi 12,9% pada tahun 2007 dan 14% pada tahun 2013 (Riskedas).

2. TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

Pendidikan dasar adalah pendidikan minimum yang wajib diikuti oleh setiap warga negara sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai warga negara dan harga diri suatu bangsa. APM Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 mencapai 87,99 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 90,14 di tahun 2012. Selain APM, untuk mengukur peningkatan pendidikan suatu wilayah juga dapat digunakan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi penurunan daya serap di jenjang Sekolah Dasar, 98 persen. Kemudian angka penyerapan meningkat di tahun 2013 menjadi 104 persen. Jumlah anak putus sekolah terus menurun, namun harus diakui bahwa mayoritas peserta didik putus sekolah di tingkat awal pendidikannya, kelas I dan kelas II. Kejadian siswa putus sekolah lebih banyak di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan partisipasi sekolah adalah dengan mengeluarkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sejak tahun 2012. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun terus meningkat dan AMH DKI Jakarta berada diatas rata-rata angka nasional.

3. TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara telah memberikan luang yang cukup luas bagi perempuan untuk berkreasi dan mengejar mimpi melalui pendidikan yang lebih baik. Berbagai kemajuan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Politik telah diraih. Kesetaraan gender tidak hanya terfokus pada terbukanya akses pada perempuan tetapi konsep dari kesetaraan gender adalah terbukanya akses dan partisipasi yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan Gubernur melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Percepatan PUG di daerah dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Untuk DKI Jakarta, Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di setiap jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA hingga PT di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 mencapai 98,78, 99,5, 97,64 dan 121,53. Sedangkan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki kelompok usia 15-24 tahun pada tahun 2013 mencapai 100,24. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan disektor non pertanian menunjukkan kecenderungan yang terus menurun. Hal ini nampak dari persentase tahun 2013 yang menurun dari 39,58 persen di tahun 2012 menjadi 34,99 persen di tahun 2013.

4. TUJUAN 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Baik buruknya status kesehatan anak diantaranya dapat dilihat dari AKB, AKBA, dan Angka Kematian Neonatal. Angka Kematian Bayi Provinsi DKI Jakarta terus menurun. Pada tahun 2012, Angka Kematian Balita Provinsi DKI Jakarta tercatat 31 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi mencapai 22 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatal tercatat 15 per 1000 kelahiran hidup. Sementara cakupan imunisasi campak untuk anak usia 1 tahun mencapai 86,5 persen pada tahun 2013.

5. TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah wanita yang meninggal karena disebabkan oleh gangguan kehamilan atau penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidential) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilannya per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2007 tercatat 41 per 100.000 kelahiran hidup menurut data yang dikumpulkan melalui SDKI. Pada tahun 2013 proporsi kelahiran hidup yang ditolong tenaga kesehatan terlatih di Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi, yaitu sebesar 99,8 persen.

Angka pemakaian kontrasepsi diantara wanita usia 15-49 tahun khususnya di DKI Jakarta pada tahun 2013 adalah sebesar 51,46 persen. Hingga tahun 2013 tercatat 50,43 persen perempuan menikah usia subur di Provinsi DKI Jakarta meggunakan alat kontrasepsi modern. Menurut data yang dapat diperoleh dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, terdapat 2,4 persen remaja perempuan DKI Jakarta pernah memiliki anak lahir hidup. Pada tahun 2013, berdasarkan data statistik yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan perawatan antenatal perempuan usia subur di Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan angka nasional, baik itu 1 kunjungan maupun 4 kunjungan. Namun, walaupun angka DKI Jakarta lebih tinggi dari angka nasional, ada penurunan persentase kunjungan antenatal pada tahun 2013. Pada tahun 2010 terdapat 98 persen perawatan antenatal untuk 1 kali kunjungan dan menurun menjadi 86,0 persen pada tahun 2013. Sama halnya dengan 4 kali kunjungan, pada tahun 2010 tercatat 84,5 persen turun menjadi 78,3 persen pada tahun 2013. Berdasarkan data SDKI tahun 2012 terjadi peningkatan unmet need yang sangat drastis dari 6,9 persen (2007) menjadi 13,2 persen (2012).

6. TUJUAN 6 : MEMERANGI HIV DAN AIDS, MALARIA, DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Angka penyebaran epidemi HIV/AIDS DKI Jakarta menunjukkan trend yang terus meningkat dan DKI Jakarta telah menempati posisi ketiga jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS tertinggi dibawah Papua dan Jawa Timur. Data Kementerian Kesehatan mencatat ada 300 penderita HIV/AIDS pada 100,000 penduduk DKI Jakarta. Data Prevalensi kasus HIV/AIDS per 100.000 penduduk menunjukkan adanya peningkatan jumlah prevalensi HIV/AIDS dari 44,74 (2010) menjadi 77,82 (2013). Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus pada pencegahan pertambahan jumlah kasus prevalensi dan penderita HIV/AIDS.

Belum seluruhnya penduduk dengan HIV/AIDS yang mau mengakses obat-obatan anti-retroviral, dari jumlah keseluruhan hanya sekitar 53 persen. Hal ini dapat disebabkan karena perasaan malu dan enggan dari para penderita HIV/AIDS.

Untuk malaria, DKI Jakarta telah mencapai posisi zero-cases dimana tidak ada lagi penderita malaria. Kementerian kesehatan juga telah menyatakan Provinsi DKI Jakarta telah dinyatakan eliminasi dari kasus Malaria. Fokus dalam pengendalian malaria diprioritaskan pada pengamatan daerah-daerah

resertif dan manajemen lingkungan. Sementara itu, untuk penyakit menular lainnya seperti TBC, Data Riskesdas tahun 2007 menunjukkan penyakit TB terdeteksi dengan prevalensi 1,3% tersebar diseluruh wilayah dengan rentang prevalensi 0,6% di Jakarta Barat dan 2,7% di Kepulauan Seribu. Menurut data riskesdas tahun 2013, Provinsi DKI Jakarta diposisi kedua Provinsi yang memiliki prevalensi penduduk yang didiagnosis TB tertinggi (0,6%) setelah Jawa Barat.

7. TUJUAN 7 : MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta telah mencapai 1105,64 Ha di tahun 2013. Hal ini disebabkan upaya optimal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau dan pembangunan taman sebagai paru-paru kota. Disisi lain penanaman pohon pelindung terus dilakukan, daerah pesisir penanaman mangrove 93.600 (2013) dimana 12.573 pohon khususnya untuk tanaman holtikultura yang produktif.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu menambah sarana prasarana dalam hal peningkatan akses masyarakat pada air minum layak dan sanitasi layak. Khusus untuk air minum layak, Provinsi DKI Jakarta telah melampaui target MDGs namun untuk sanitasi dan rumah tangga kumuh perkotaan masih perlu disesuaikan lagi dengan target yang telah ditetapkan.

2.7 Isu Strategis dan Permasalahan Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Jakarta tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Jadi pada dasarnya Pembangunan DKI Jakarta juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersendiri yang berbeda dengan provinsi lain. Dengan dasar ini maka diperlukan penangangan dan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi isu–isu strategis agar penangangannya lebih komprensif, terstruktur dan aplikatif.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan penyediaan infrastruktur, pembangunan moda transportasi, penyeimbangan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, peningkatan ketahanan sosial dan budaya, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan, pengembangan kerjasama regional, dan pemantapan daya saing ekonomi daerah.

2.7.1. Sistem Transportasi dan Permasalahannya

Pembangunan transportasi di DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak mencukupi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, ketersediaan

dan akses prasarana jalan untuk mendukung pelabuhan dan bandar udara, transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Kapasitas jalan sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota Jakarta. Penambahan ruas jalan yang hanya sekitar 1 (satu) persen per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai sekitar 11 persen per tahun. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan. Hampir semua ruas jalan arteri di Jakarta sudah mengalami kemacetan.

Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Kapasitas angkutan umum hanya mampu melayani sekitra 19 persen dari jumlah permintaan perjalanan. Pertambahan kendaraan bermotor terus meningkat setiap waktu.

Sistem dan jaringan transportasi multimoda belum terintegrasi dengan baik menyebabkan tidak efisien dan efektifnya mobilitas penduduk. Sistem transportasi angkutan jalan raya tidak terhubung dengan baik dengan sistem dan jaringan transportasi berbasis rel. Begitu pula sistem dan jaringan angkutan bus massal (busway) belum terintegrasi dengan sistem angkutan feeder yang melayani permukiman masyarakat.

Ketersediaan prasarana jalan dan akses untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta tidak memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses aliran barang yang akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Akses jalan menuju dan dari pelabuhan dan bandara menggunakan jaringan jalan yang juga digunakan untuk menunjang kegiatan perkotaan lainnya. Padahal kendaraan barang yang melintas termasuk kendaraan dengan beban berat. Selain merusak daya tahan jalan yang ada juga meningkatkan beban jalan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang dilewatinya.

Ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan Kota Jakarta.

Kemacetan di Jakarta disebabkan juga oleh rendahnya tingkat kedisplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidakdisiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalu lintas.

Pada pembangunan transpotasi salah satu permasalahan adalah pembebasan tanah. Pembebasan tanah yang tidak terlaksana disebabkan

oleh kendala proses adminsitrasi dan ketidaksesuaian harga yang ditawarkan pemilik tanah dan bangunan NJOP dan dengan harga ketentuan yang berlaku. Untuk itu telah dilakukan appraisal dan perencanaan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.7.2. Banjir dan Genangan

Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan di DKI Jakarta. Berdasarkan faktor penyebabnya banjir yang terjadi di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: i) banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai dan menggenangi wilayah permukiman, ii) banjir yang disebabkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir atau di Jakarta dengan topografi wilayah rendah, iii) banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob). Bencana banjir luar biasa terjadi apabila ketiga faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi secara bersamaan seperti pada tahun 2002 dan 2007 yang mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi sangat besar bagi warga kota.

Banjir akibat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu terutama di Bogor dan Depok meningkatkan volume dan tinggi air pada sungai Ciliwung yang mengalir ke Kota Jakarta. Peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Air hujan yang masuk melebihi kapasitas dan daya tampung sungai yang makin dangkal dan menyempit. Meningkatnya volume air sungai pada waktu terjadinya hujan deras di wilayah hulu dapat dimonitor dari ketinggian pintu air di Katulampa Bogor. Di samping berkurangnya daerah resapan, pendangkalan dan penyempitan sungai di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung meningkatkan potensi banjir karena meluapnya air sungai. Selain itu perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di selokan dan sungai dapat menghambat aliran air serta terjadinya sedimentasi yang mengurangi kapasitas sungai dan saluran.

Banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di Kota Jakarta terjadi pada satu waktu ketika peningkatan volume air hujan tidak dapat ditampung sungai dan saluran drainase kota yang ada. Selain itu Jakarta juga merupakan muara dari 13 sungai yang mengalir dari wilayah hulu dengan sebagian besar (40 persen) topografi wilayah Jakarta merupakan dataran rendah (1-1,5 meter dpl). Beberapa bagian wilayah Jakarta menjadi lokasi langganan banjir dan genangan karena terletak pada dataran rendah dan daerah aliran sungai.

Banjir dan genangan terjadi juga akibat pasang air laut atau dikenal dengan banjir rob yang terjadi di pantai utara Jakarta. Gelombang tinggi disertai banjir rob yang terjadi di perairan utara Jakarta disebabkan karena perubahan angin barat yang terjadi di musim penghujan. Dampak

banjir rob di pesisir pantai utara Jakarta semakin parah dengan terjadinya penurunan tanah yang mencapai 10 centimeter setiap tahunnya.

Dalam mengatasi genangan dan banjir salah satu masalahnya adalah pembebasan tanah. Pembebasan tanah tidak terlaksana secara optimal yang disebabkan oleh berbagai hal terutama tidak adanya kesepakatan harga dengan pemilik tanah. Untuk itu telah dilakukan appraisal dan perencanaan pembebasan tanah dengan menggunakan ketentuan yang berlaku.

2.7.3. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Perhitungan kekurangan kebutuhan rumah (backlog) mencapai 700.000 rumah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir atau sekitar 70.000 rumah setiap tahunnya.

Pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada keterbatasan lahan di wilayah Jakarta. Sehingga penyediaan kebutuhan rumah oleh pemerintah dan swasta lebih banyak dibangun secara vertikal dibandingkan dengan rumah horizontal yang membutuhkan lahan besar. Namun, penyediaan hunian secara vertikal masih dihadapkan pada adanya kesenjangan budaya masyarakat yang belum terbiasa tinggal di hunian vertikal.

Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman kumuh cenderung menurun dan menjadi 5.050 hektar pada tahun 2008, namun peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh baru. Selain itu masih banyak kawasan permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong.

Untuk Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung, khususnya kegiatan Penataan Kampung/ Perbaikan Rumah yang tidak dapat terlaksana di tahun 2014 dikarenakan adanya indikasi kurang tepatnya target sasaran calon penerima hibah pada 5 wilayah kota administrasi. Untuk itu telah dilakukan identifikasi sasaran secara lebih awal melalui pemetaan dan survey lapangan.

2.7.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan sehat. Ketersediaan RTH di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di DKI Jakarta meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau.

Peningkatan penyediaan RTH publik menghadapi masalah terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan adalah melalui pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau, dan mendorong masyarakat/privat untuk meningkatkan luas RTH di lahan milik mereka. Peran serta masyarakat dalam peningkatan RTH diwujudkan dalam pengembangan tajuk hijau terutama melalui penghijauan lingkungan dan bangunan. Permasalahan lain dalam adalah belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk waktu ke depan pemangku kepentingan pembangunan daerah di Jakarta harus dapat mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai serta jalur hijau pada jaringan jalan, sempadan sungai, danau, waduk dan situ, gedung-gedung bertingkat seperti mal, gedung perkantoran, apartemen, hotel, dan fasilitas publik. Di samping itu, diperlukan upaya identifikasi ruang dan kawasan yang dapat difungsikan kembali dan berpotensi sebagai RTH serta upaya membebaskan lahan milik publik secara bertahap untuk dimanfaatkan sebagai RTH.

Salah satu isu penting dalam lingkungan adalah Pembangunan Sistem Informasi dan Pengawasan Penanganan Sampah. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara optimal pada tahun 2014. Hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2014 masih dalam tahap pengumpulan data geospasial sarana dan prasarana pengolahan sampah. Untuk itu kegiatan ini akan dianggarkan kembali pada tahun 2015 dengan perencanaan yang lebih komprehensif.

Selain itu, pemberdayaan dan penggalangan peran serta masyarakat dalam pengembangan pertamanan dan pemakaman masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan lelang, anggaran tidak mencukupi karena harga material mengikuti kurs US dollar serta status tanah yang belum jelas. Untuk itu telah dilakukan antisipasi dengan penyusunan RAB yang lebih realistis dan penelitian status tanah.

2.7.5. Kemiskinan Kota

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan DKI Jakarta. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi.

Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan ganggguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

Pengembangan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas Rawat Inap selain Rawat Bersalin mengalami kendala keterlambatan pekerjaan konstruksi. Dari target 10 Puskesmas yang akan dikembangkan pada Tahun 2014, hanya 1 Puskesmas yang selesai dikembangkan. Hal ini dikarenakan penghapusan aset bangunan lama, baru terlaksana pada Bulan Agustus-September 2014, sehingga pelaksanaan kontruksi baru dapat dilakukan setelah penghapusan aset selesai. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan pekerjaan adalah dengan melanjutkan pekerjaan kontruksi pada Tahun 2015.

2.7.6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi, antara lain: penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government), penyederhanaan sistem perizinan dan non perizinan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system".

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan. Selain itu upaya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang

prima. Kemudian, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

Salah satu hal yang setrategis dalam reformasi birokrasi adalah pelayanan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan mudah sehingga membutuhkan SDM dan infrastruktur pelayanan yang mencukupi dan memadai. Untuk itu telah dilakukan pemenuhan formasi pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua jenis pelayanan yang dilimpahkan.

2.7.7. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Jakarta di tingkat global. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat serta masih terjadi tawuran antar pelajar.

Penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing global, melalui penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Selain itu pada urusan pendidikan diperlukan beberapa kegiatan yaitu penyediaan data terkini peta kondisi gedung sekolah dan sarana penunjang pendidikan sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi/perawatan, rehab total jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

2.7.8. Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan kesehatan di DKI Jakarta dikembangkan promosi kesehatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta khususnya keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

2.7.9. Penataan Ruang

RTRW 2030 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas.

2.7.10. Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Jakarta merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial

dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Di sisi lain, pemahaman dan implementasi demokrasi yang tidak komprehensif telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali. Sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unjuk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan secara hati-hati berpotensi untuk menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Dengan demikian kedewasaan dan sikap-sikap elegan khususnya pada masyarakat DKI Jakarta menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pengendalian ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang aman, tentram dan tertib.

2.7.11. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi secara global memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan wilayah dan kelompok masyarakat miskin perkotaan. Kawasan pesisir pantai Jakarta termasuk area yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terkena dampak dan resiko perubahan iklim. Faktor lain yang menyebabkan tingginya tingkat kerentanan Kota Jakarta adalah jumlah dan kepadatan penduduk serta persentase masyarakat miskin kota yang tinggal di pesisir pantai.

Perubahan iklim yang terjadi telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah. Selain itu, perubahan iklim juga akan meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Jakarta antara lain banjir, rob, dan kekeringan. Dampak lainnya adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumber daya lahan, serta terganggunya ketahanan pangan dan pada gilirannya akan berimplikasi kepada peningkatan jumlah kemiskinan. Permasalahan yang muncul ini sebagai akibat dampak perubahan iklim sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

2.7.12. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat tiga kelompok permasalahan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta, yaitu persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara.

Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir. Peningkatan produksi sampah kota merupakan konsekuensi logis dari pertambahan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma 'membuang sampah' belum pada 'mengolah sampah dari sumbernya. Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3R *(reduce, reuse, recycle)*. Penyediaan tempat proses akhir sampah dihadapkan pada keterbatasan lahan sehingga masih bergantung pada kerjasama dengan wilayah sekitarnya dalam pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di wilayah sekitar.

Pengelolaan kualitas air permukaan masih dihadapkan pada terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah padat. Cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat belum memadai dan melayani seluruh wilayah kota. Selain itu pengelolaan limbah setempat belum banyak digunakan terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terencana. Pencemaran air tanah disebabkan terutama oleh penggunaan septic tank yang belum memenuhi standar lingkungan. Saat ini pada kawasan perumahan baru terencana penggunaan septik tank sebagai penampungan limbah domestik sudah banyak dilakukan, meski masih perlu disosialisaikan tentang penggunaan septic tank yang memenuhi standar lingkungan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) belum banyak diterapkan pada skala kota, tetapi masih terbatas pada lokasi industri logam berat dan pengolahan limbah rumah sakit.

Sedangkan sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas daerah.

2.7.13. Pengelolaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih, ii) terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah, iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.

Penyediaan air bersih yang berasal dari sumber air tanah perlu dikendalikan secara ketat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali menimbulkan dampak terhadap penurunan muka tanah *(land subsidence)* yang sampai saat ini berkisar antara 1-15 centimeter per tahun terutama di wilayah pantai utara Jakarta. Penurunan muka tanah juga disebabkan oleh

adanya beban bangunan *(settlement)*, konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah dan gaya-gaya tektonik.

Meskipun penyediaan air bersih sudah mencakup lebih dari 75 persen rumah tangga di Jakarta, namun secara kualitas penyediaan air bersih masih menggunakan sumber air tanah (sumur) dan cakupan pelayanan dari sistem perpipaan masih rendah. Ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan, karena selama ini sumber air baku masih mengandalkan pengolahan air sungai dan pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur.

2.7.14. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi. Peningkatan aksesibilitas pangan menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan mengingat Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan daerah sekitarnya. Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di DKI Jakarta yang berkelanjutan.

2.7.15. Ketahanan Energi Listrik dan Gas

Kebutuhan energi listrik setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan kegiatan rumah tangga dan usaha. Peningkatan beban listrik di seluruh wilayah Jakarta, termasuk kebutuhan energi listrik di wilayah Kepulauan Seribu masih bergantung pasokan dari pembangkit listrik yang ada. Kebutuhan energi listrik di DKI Jakarta masih sangat bergantung pasokan pembangkit di Muara Karang dan belum ada penambahan pasokan dari sistem pembangkit baru. Pembangkit tenaga listrik di Provinsi DKI Jakarta seluruhnya dibangkitkan mesin pembangkit (power generator) diesel dan air. Untuk itulah perlu dipikirkan upaya untuk meningkatkan penyediaan energi listrik dan sumber energi lainnya yang memadai dan mencukupi.

Dalam konteks sumber energi gas, penggunaan gas sebagai bahan bakar terus meningkat terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan bisnis. Untuk itu penyediaan energi dari gas perlu mendapat perhatian khusus dari para pemangku kepentingan pembangunan DKI Jakarta.

2.7.16. Stabilitas Ekonomi

Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan *(sustainable economic growth)*. Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Jakarta) seperti: sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian untuk laju inflasi di DKI Jakarta hampir selalu berada di bawah nasional dalam lima tahun terakhir hingga tahun 2010. Sedangkan untuk nilai tukar dalam peranannya terhadap stabilitas ekonomi cenderung mengikuti dinamisasi dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Bank Indonesia.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif.

2.7.17. Iklim Investasi

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di DKI Jakarta diantaranya adalah kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh SKPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukan proses yang ideal.

Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya

adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.

2.7.18. Perdagangan dan Jasa

DKI Jakarta sebagai kota jasa memerlukan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan mencukupi agar dapat bersaing dengan kota-kota internasional lain. Untuk mewujudkan fungsi kota jasa tersebut permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah persiapan infrastruktur guna mengahadapi aktivitas perdagangan baik dalam maupun luar negeri terutama dalam menghadapi regionalisasi ekonomi. Hal ini penting karena regionalisasi ekonomi baik di lingkungan ASEAN maupun di luar ASEAN diperkirakan akan mempengaruhi perdagangan di DKI Jakarta. Dengan persiapan yang mantap maka kinerja DKI Jakarta dapat berkompetisi dalam konteks menghadapi AFTA (Asean Free Trade Area), ACFTA (Asean-China Free Trade Area), dan kelompok perdagangan internasional lainnya. Untuk itu diperlukan persiapan secara terencana dan sistematis agar produk DKI Jakarta dapat berkompetisi dengan produk internasional, sehingga membanjirnya produk yang berasal dari luar negeri di DKI Jakarta dapat diantisipasi secara profesional.

Posisi strategis DKI Jakarta terhadap perekonomian nasional dan internasional membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan instrumen pembangunan untuk melangsungkan kegiatan perekonomian regional dan aktivitas jasa keuangan dan jasa lainnya berskala nasional dan intenasional. Di masa yang akan datang, DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodir dan melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketersediaan SDA dan infrastruktur publik yang mencukupi dan memadai serta berdaya saing didukung dengan kebijakan publik yang kondusif akan dapat mendukung iklim investasi secara berkelanjutan.

2.7.19. Keuangan Daerah

Pembangunan Jakarta perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan non-konvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional.

Selain itu, DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan daerah lain. Sejalan dengan hal ini, DKI Jakarta harus mampu menyediakan prasarana dan sarana khusus yang sudah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam kaitannya dengan hal ini maka permasalahannya adalah meningkatkan dukungan pendanaan untuk pembiayaan pembangunan dalam kerangka Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tata kelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkat pemerintah, mulai dari kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi dan provinsi. Selain itu, peningkatan profesionalitas seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta sesuai standar yang ditentukan.

2.7.20. Kerjasama Antar Daerah di Jabodetabekjur

Pembangunan DKI Jakarta sangat terkait pemanfaatan sumber daya dengan wilayah sekitarnya. Untuk itu diperlukan kerjasama antar daerah untuk menangani masalah yang bersifat regional seperti pengelolaan sampah, transportasi, polusi dan banjir. Permasalahan utama kerjasama antar daerah adalah belum optimalnya koordinasi dalam kerangka kerjasama di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan publik seperti transportasi dan pengelolaan air bersih masih perlu perhatian dari para pemangku kepentingan.

Dalam rangka kerjasama antar daerah di wilayah Jabodetabekjur telah dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan program kerjasama antar provinsi dan kota/kabupaten di dalamnya. Untuk koordinasi BKSP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus ditingkatkan berpedoman pada peningkatan pelayanan publik yang terintergrasi dengan pemerintah daerah sekitar.

Selain isu dan permasalahan seperti diuraikan pada penjelasan diatas, pada tahun 2014 dihadapi beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan Belanja Langsung, yaitu :

1) Proses lelang kegiatan yang berjalan lamban akibat :
   a) Belum optimalnya Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta
   b) Belum lengkapnya sarana prasarana pendukung layanan pengadaan
   c) Minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam melayanai proses layanan pengadaan
   d) Belum optimalnya sosialisasi secara jelas dan luas kepada SKPD/UKPD tentang syarat dan ketentuan pengajuan kegiatan untuk proses lelang sehingga tidak semua kegiatan bisa diproses.
2) Terlambatnya proses penetapan Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2014 berdampak pada singkatnya sisa waktu pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan anggaran tidak terserap.
3) Untuk Belanja Hibah BOP dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu / Keluarga /Masyarakat (Penataan Kampung) tidak terlaksana karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya dari permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah langkah untuk mengatasi hal ini, yaitu :

1) Penguatan kapasitas lembaga Unit Layanan Pengadaan menjadi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa agar secara kualitas dan kuantitas proses lelang dapat lebih maksimal.
2) Meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan melalui koordinasi dengan SKPD/UKPD serta memberikan peringatan kepada SKPD yang target kinerjanya tidak tercapai.
3) Mempercepat proses administrasi, perijinan dan pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), optimalisasi pengadaan barang jasa dengan menggunakan e-purchasing, e-catalog dan optimalisasi pengadaan barang jasa dengan menggunakan sistem pengadaan terkonsolidasi untuk kegiatan-kegiatan sejenis / kegiatan-kegiatan serumpun.
4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian hukum yang komprehensif sehingga untuk tahun yang akan datang proses realisasi anggaran untuk hibah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas.

Selanjutnya penjabaran mengenai permasalahan yang masih dihadapi, mendesak dan perlu dilakukan penanganan lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel 2.14 yaitu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 2.14 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	MASALAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	STRATEGI
1.	Pengembangan sistem transportasi	• kapasitas jalan yang sudah tidak mencukupi.	• Ketersediaan dan kualitas Aksesibilitas	• Pengembangan simpang tak sebidang
				• Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan
		• terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum	• Kualitas dan kuantitas armada angkutan umum massal yang bersinergi.	• Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
		• sistem dan jaringan multimoda belum terintegrasi.	• sistem transportasi yang terpadu.	• Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi
				• Pengendalian dan Keselamatan Transportasi
				• Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas
				• Penataan sistem perparkiran
2.	Antisipasi Banjir,	• tingginya	• Kualitas sistem tata	• Pemeliharaan sarana prasarana

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	MASALAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	STRATEGI
	Rob, Dan Genangan	intensitas hujan di wilayah hulu sungai • tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir dengan topografi wilayah rendah • Kapasitas daya tampung sistem tata air (sungai dan saluran, pintu air, polder, situ dan waduk, proteksi air laut) belum optimal.	air yang terpadu. • Ketersediaan sarana prasarana sistem drainase. • Konservasi sumberdaya air • sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah daerah sekitar dan masyarakat.	drainase
		• tingginya intensitas hujan di wilayah hulu sungai • tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir dengan topografi wilayah rendah • Kapasitas daya tampung sistem tata air (sungai dan saluran, pintu air, polder, situ dan waduk, proteksi air laut) belum optimal.	• Kualitas sistem tata air yang terpadu. • Ketersediaan sarana prasarana sistem drainase. • Konservasi sumberdaya air • sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah daerah sekitar dan masyarakat.	• Pengembangan sarana dan prasarana sistem drainase
		• banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob)	• Kualitas Pengendalian banjir akibat air laut pasang	• Pengendalian banjir akibat air laut pasang
3.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota	• kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru • keterbatasan lahan di wilayah Jakarta • Terbatasnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.	• Pembangunan hunian berorientasi vertikal. • Ketersediaan hunian beorientasi daya dukung lingkungan.	• Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa • Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta • Pengembangan rumah susun sewa
		• masih terdapatnya permukiman yang kurang sehat dan tertata	• Kualitas revitalisasi hunian berorientasi lingkungan maupun pembangunan kembali.	• Penataan kawasan permukiman kumuh skala kota
4.	Perlindungan Dan	• Akses akan air	• Akses air bersih	• Pengembangan sistem air minum

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	MASALAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	STRATEGI
	Pengelolaan Lingkungan Hidup	bersih bagi seluruh masyarakat belum optimal		perpipaan
		• meningkatnya produksi sampah kota, • sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, • terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir	• Kinerja Pengelolaan Persampahan • Kualitas teknologi Pengelolaan sampah • Implementasi konsep/nilai daur ulang (3R)	• Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan • • Penerapan Konsep 3R • Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat
5.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH	• terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. • belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah DKI Jakarta	• kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau publik dan privat • kualitas dan kuantitas taman sebagai ruang publik	• Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat • Peningkatan kualitas taman sebagai ruang publik
6.	Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja	• Masih terdapatnya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan perkotaan • Masih diperlukannnya upaya – upaya untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	• Ketersediaan ruang dan akses modal bagi sektor informal • kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal • keterampilan dan kualitas tenaga kerja	• Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan • Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggusur PKL • Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja
7.	Isu Pembangunan Budaya Multi-Kultur	• Keragaman sosial dan budaya masyarakat Jakarta selain sebagai potensi pembangunan, juga sebagai faktor pendorong terjadinya konflik sosial. • fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat.	• sinergisitas budaya lokal dengan budaya multikultur lainnya. • Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional. • sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang aman, tentram dan tertib.	• Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional
		• Diperlukannya pelestarian budaya Jakarta	• Pengembangan budaya Betawi • Kualitas pelestarian seni budaya dan kawasan cagar budaya	• Pengembangan budaya Betawi yang bersinergi dengan budaya multikultur lainnya • Penyelenggaraan event-event kebudayaan • Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	MASALAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	STRATEGI
8.	Peningkatan Pelayanan Publik	• Perlunya penerapan reformasi birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) aparat pemerintahan. • Perlunya penataan kelembagaan yang efektif, efisien dan transparan.	• sistem *reward and punishment* dalam pengembangan SDM. • kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien.	• Pengembangan sistem reward and punishment dalam pengembangan SDM. • Proses pengisian jabatan secara terbuka
		• Perlunya Sinergisitas antar lembaga pemerintah dan pemerintah dengan swasta dan masyarakat.	• Perumusan kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.	• Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel • Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time • Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik
9.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	• Masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki	• Kualitas dan Kuantitas prasarana dan sarana pendidikan	• Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR
		• Perlunya peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. • masih terjadi tawuran antar pelajar	• Kualitas dan Kuantitas tenaga pengajar.serta metode pengajaran.	• Peningkatan kualitas layanan pendidikan
		• perlunya peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat	• akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat	• Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR
10.	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	• belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan. • Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular. • rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.	• akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta	• Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta
		• Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas.	• kualitas kelembagaan, tata kelola dan kualitas prasarana sarana kesehatan	• Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta

No	PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN BERKENAAN	MASALAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	STRATEGI
11	Penguatan Ketahanan Pangan	• Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan daerah sekitarnya.	• Pengelolaan dan ketersediaan kebutuhan pangan	• Optimalisasi distribusi komoditas dan kebutuhan pokok menghadapi ketatnya persaingan pasar
12	Pembangunan Energi dan Telematika Jakarta	• Kebutuhan energi listrik di DKI Jakarta masih sangat bergantung pasokan pembangkit di Muara Karang. • belum ada penambahan pasokan dari sistem pembangkit baru.	• Ketersediaan sistem pembangkit energi baru	• Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien • penataan jaringan utilitas perkotaan
		• Jakarta ke depan dituntut untuk menjadi kota internasional yang kompetitif. • Perlunya Penggunaan telematika sebagai tulang punggung pembangunan Jakarta menjadi kota pintar	• Ketersediaan, efektifitas, dan efisiensi teknologi dalam mendukung Jakarta sebagai Kota Pintar	• Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum